

BAB 3

PERSATUAN PEWARTA WARGA INDONESIA

3.1.Organisasi PPWI

3.1.1.Profil

Di Indonesia, organisasi untuk para *citizen journalist* telah terbentuk, yang disebut Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Indonesian Citizen Journalist Reporter Association) atau PPWI. PPWI masih merupakan satu-satunya lembaga *citizen* jurnalis resmi yang ada di Indonesia. PPWI mulai aktif sejak tanggal 11 Nopember 2007. dengan pelopor/pendiri dan Ketua Umum Wilson Lalengke.

Dalam buku *Langkah Otomatis Jadi Citizen Journalist* disebutkan sejarah PPWI muncul seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang juga memengaruhi kemajuan tulis-menulis yang kemudian melahirkan banyak penulis Indonesia berbakat dari berbagai kalangan dari semua profesi. Tren kegemaran menulis di media-media *online* yang disediakan oleh teknologi internet telah mempertinggi percepatan penambahan jumlah penulis tidak hanya di manca negara, namun juga di dalam negeri. Kehadiran *website* pribadi dan kelompok (kecil-besar), *mailing list*, hingga blog yang sedang mengalami *booming* dalam beberapa tahun belakangan ini, telah memberikan warna baru dalam dunia tulis-menulis. CJ (jurnalisme warga negara) akhirnya menjadi penyedia jalur bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam dunia jurnalisme yang bersentuhan langsung dengan sistem penyampaian berita ala media massa.

Pada perkembangan lebih lanjut, beberapa kalangan telah menginisiasi pembentukan media massa tanpa batas yang didedikasikan bagi siapa saja yang ingin menulis, dan menyampaikan informasi atau berita yang dimilikinya untuk dipublikasikan pada media-media massa yang mereka bangun. Sebutlah beberapa media di Indonesia seperti koran *online KabarIndonesia*, *Halamansatu*, *Panyingkul*, dan lain-lain. Baru pada saat paling terakhir ini, beberapa media massa utama, seperti *Kompas* dan *Republika* mencoba memberi ruang bagi

penulis pewarta warga untuk ikut berpartisipasi di media mereka, namun masih terbatas pada media *online* yang mereka kelola.

Dari pojok lain, keberadaan para “hobi-nulis” tersebut cukup kesulitan menjalankan aktivitas menulis karena terkendala oleh sumber informasi primer yang sukar diakses akibat ketiadaan wadah atau organisasi yang menaungi dan mendukung mereka. Kenyataannya, untuk bisa bergabung di salah satu persatuan penulis (wartawan) profesional, para penulis non profesional tersebut harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh mereka yang tidak memiliki media tetap ataupun profesi sebagai reporter. Hal ini menimbulkan hambatan bagi setiap penulis untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber, terutama yang bersifat protokoler, karena akan dianggap sebagai pengumpul informasi liar, dan lain sebagainya. Hal inilah yang mendorong para penulis pewarta warga untuk mendirikan suatu organisasi yang dapat menampung semua penulis pewarta warga dari latar belakang apa pun.

Yang dimaksud dengan pewarta warga (*citizen reporter*) adalah mereka yang memiliki hobi menulis, baik untuk konsumsi media massa *online* dan *offline*, maupun menulis di blog ataupun di milis dan media lainnya. Pewarta warga juga termasuk mereka yang beraktivitas memberitakan informasi dan berita berbentuk berita foto, berita video/film, dan pemberi informasi via telepon ke stasiun radio dan televisi. Pada saat ini siapa saja bisa menjadi reporter tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan jurnalisme atau apapun juga. Setiap pemilik blog ataupun setiap orang yang pernah menulis di milis, dapat dikategorikan sebagai *citizen reporter*.

Umumnya, pewarta warga menulis bukan untuk konsumsi media *mainstream* atau media utama seperti majalah atau koran-koran lainnya, melainkan untuk sesama pembaca. Reporter-reporter orang biasa ini lebih dikenal dengan sebutan para pewarta warga atau *citizen reporter* atau *citizen journalist*. Mereka tidak terikat dengan/oleh media massa elektronik (*online*) ataupun media massa cetak tertentu. Dengan demikian, mereka bisa jauh lebih bebas mengungkapkan pendapat maupun pikiran mereka masing-masing.

Situasi dan kondisi semua orang adalah penulis dan pewarta yang menjadi prinsip CJ ini, tak bisa dipungkiri telah memberi peluang kepada setiap orang untuk menjalankan perannya sebagai wartawan . Kata wartawan yang diberi tanda petik ini dimaksudkan bahwa setiap orang dapat menjalankan fungsinya sebagai pewarta, penyampai berita, dan sejenisnya, tanpa harus menjadi wartawan sebuah media massa konvensional (koran, majalah, tabloid, dan lain-lain). Dengan kata lain, seorang ibu rumah tangga dapat tetap menjalankan perannya sebagai *full timer* ibu rumah tangga, namun dia juga dapat menghasilkan tulisan yang berisi berita atau artikel dan mempublikasikannya di media-media massa yang tersedia, baik *online* maupun *offline*.

Saat ini, terdapat ratusan ribu bahkan jutaan wartawan atau *citizen reporter* (pewarta warga) di hampir setiap sudut nusantara dan dunia. Mereka memiliki bakat, potensi, dan bahkan ketrampilan yang baik sebagai penulis. Namun sayangnya mereka tidak diakui dan juga tidak memiliki wadah atau tempat di mana mereka bisa bergabung maupun mengekspresikan hasil karyanya, layaknya sebuah media massa konvensional. Yang lebih menyakitkan, pengakuan atas hasil karya tulis-menulis mereka juga hampir selalu tidak diakui oleh para penulis profesional bahkan dicibirkan sebagai penulis amatiran. Ribuan lembar artikel dan berita yang ditulis oleh para wartawan non profesional tersebut hanya masuk tong sampah redaktur surat kabar, majalah, tabloid, dan sejenisnya, tanpa dibaca dengan selayaknya.

Dalam hal berorganisasi, untuk bisa turut bergabung di salah satu persatuan wartawan profesional, mereka diwajibkan memenuhi berbagai macam persyaratan yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh mereka yang tidak memiliki media tetap ataupun profesi sebagai wartawan atau reporter. Hal inilah yang mendorong para *citizen reporter* untuk mendirikan organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) atau The Indonesian Citizen Reporter Association.

Tujuan utama pendirian organisasi ini adalah untuk menampung para penulis, baik profesional, penulis pemula, dan semua orang yang mencintai dunia tulis-menulis dari semua kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, tukang becak, pedagang, orang kantoran, wiraswastawan, pengacara, siswa/mahasiswa hingga

yang bergelar profesor doktor. Siapa saja boleh bergabung menjadi anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Salah satu keistimewaan PPWI adalah bahwa organisasi ini bersifat global, sehingga semua pewarta warga Indonesia di pelosok dunia manapun juga bisa turut bergabung menjadi anggota, tanpa ada batasan dari segi pendidikan, umur, profesi, domisili, maupun kewarganegaraan.

Pewartawarga adalah mereka yang memiliki hobi menulis, seperti para *blogger*, anggota *millis*, kontributor *freelance media online*, Pemberi komentar pada berbagai artikel, dan lain-lain. Mereka menulis tidak untuk media massa *mainstream* melainkan hanya untuk berbagi Informasi dan idealisme di antara sesama pembaca, antar warga masyarakat.

Saat ini PPWI telah memiliki cabang di Yogyakarta, Palembang, Pati. Dalam beberapa waktu mendatang akan dibentuk pengurus cabang di Manado, Makassar, Padang, Semarang, Siak, dan tempat lainnya. Juga terdapat beberapa cabang di luar negeri, yakni di New Zealand, India, USA dan Belanda.

Organisasi PPWI lahir sebagai upaya tanggap zaman di mana muncul situasi dan kondisi semua orang bisa menjadi penulis dan pewarta, sehingga memberi peluang kepada setiap orang untuk menjalankan perannya sebagai wartawan. Kata wartawan yang diberi tanda petik ini dimaksudkan bahwa setiap orang dapat menjalankan fungsinya sebagai pewarta, penyampai berita, dan sejenisnya, tanpa harus menjadi wartawan sebuah media massa konvensional (koran, majalah, tabloid, stasiun radio, televisi, dan sebagainya). Saat ini, terdapat ratusan ribu bahkan jutaan “wartawan” atau *citizen reporter* (pewartawarga) di Indonesia dan juga negara lain.

Dalam hal berorganisasi, untuk bisa bergabung di salah satu persatuan wartawan profesional, mereka diwajibkan memenuhi berbagai macam persyaratan yang tidak mungkin bisa dipenuhi bagi mereka yang tidak memiliki media tetap ataupun profesi sebagai wartawan atau reporter. Hal inilah yang mendorong berdirinya organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) atau The Indonesian Citizen Reporter Association.

PPWI seperti organisasi pada umumnya, yang merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan satu tujuan bersama secara sadar serta memiliki hubungan kerja yang rasional. PPWI merupakan organisasi non-pemerintah dan independen yang menghimpun seluruh pewartanya warga Indonesia lintas profesi tanpa pengecualian apa pun. PPWI meliputi seluruh wilayah NKRI dan dunia. Berpusat dan berkedudukan di Ibukota Negara RI, Jakarta. Organisasi ini sudah memiliki akta notaris dan sudah didaftarkan ke departemen dalam negeri.

Ada beberapa hal yang harus dimiliki organisasi, termasuk PPWI agar bisa maju dan berkembang, yaitu nilai dan visi, misi, aturan-aturan, struktur, profesionalisme, insentif, sumber daya manusia dan manajemen organisasi.

3.1.2. Nilai dan Visi Organisasi

Nilai dan visi organisasi yang dimaksud merupakan tujuan besar yang akan dicapai nantinya. Jika pada suatu organisasi tidak terdapat nilai dan visi maka organisasi tersebut akan bermasalah, karena tidak memiliki pemikiran ke depan. PPWI yang merupakan satu dari sekian organisasi masyarakat yang konsern di bidang publikasi dan media massa, berupaya memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap usaha pemberdayaan setiap elemen masyarakat, terutama di tataran paling bawah, agar lebih cerdas menyikapi pemberitaan di media massa.

Tujuan ideal didirikannya PPWI adalah mewujudkan pemenuhan kebutuhan setiap warga terhadap informasi yang benar dan bebas dari kepentingan kekuatan-kekuatan tertentu, serta mencerdaskan setiap warga dalam menerima dan memberi informasi yang bertanggung jawab, mengembangkan pola jurnalisme warga yang memberikan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk menjadi pewartanya, serta menumbuhkembangkan gigi geraham penyuluh informasi secara alamiah, dinamis, nyaman dan mencapai konstruksi dasarnya yang ideal dan kokoh tanpa intervensi berlebihan dari luar. Hal tersebut ditegaskan Wilson Lalengke, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPWI :

.....visi kita adalah kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas, dalam pengertian bahwa dia mampu untuk berpartisipasi aktif dalam dunia publikasi dan media massa. Lebih daripada itu mereka mampu mencerna informasi yang ada, tidak menangkapnya menelan mentah mentah. Jadi masyarakat kita ajar, kita didik....

PPWI dengan demikian ingin mengubah paradigma. Selama ini media massa adalah milik kaum profesional, namun PPWI mempunyai visi bahwa media massa adalah tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap anggota masyarakat, yang oleh karenanya setiap orang perlu dan wajib melibatkan diri di dalam setiap proses dan tahapan jurnalisme dan publikasi informasi di media massa. PPWI adalah lembaga edukasi *melek* media, *melek* informasi, kepada seluruh warga masyarakat, pemberi pencerahan bagi dunia publikasi media massa dan saling berbagi informasi yang benar, beretika, manusiawi, dan menghargai kemanusiaan.

...PPWI ingin mengubah paradigma media massa kita yang umumnya senang melihat kesengsaraan orang lain, dan susah melihat orang lain senang. PPWI mengajak semua orang untuk bersama-sama membangun peradaban media massa dan publikasi informasi yang berkebudayaan dan berperadaban...

Tentang Visi PPWI, Bambang Nurharyadi, Ketua Dewan Pengurus Cabang PPWI Pati, juga menegaskan bahwa tujuan utama pendirian organisasi ini adalah untuk menampung para penulis, baik profesional, penulis pemula, dan semua orang yang mencintai dunia tulis-menulis dari semua kalangan, mulai dari ibu rumahtangga, tukang becak, pedagang, orang kantor, wiraswastawan, pengacara, siswa/ mahasiswa hingga yang bergelar profesor doktor.

..... PPWI ini lingkupnya ke arah perlindungan masyarakat ke arah perlindungan pewartu. Kita membela supaya warga tidak takut menyampaikan berita.....

Visi PPWI juga diterjemahkan dalam bendera organisasi dengan pemilihan warna dasar putih, siluet dan huruf biru laut, biru langit, coklat muda, dan bingkai, biru tua. Warna putih berarti suci bersih, lahiriah dan batiniah, dalam berpikir,

bersikap, dan bertingkah laku. Warna biru tua, biru laut, biru langit, berarti bersahabat dan menyatu dengan alam semesta. Manusia (warga masyarakat) adalah bagian tidak terpisahkan dari keberadaan alam semesta. Warna coklat muda, perlambang tanah dan air, sumber hidup bagi manusia di mana saja dari awal hingga ke akhir masa.

Gambar 3.1. Bendera PPWI



Siluet orang-orangan, melambangkan anggota masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Siluet satu orang-orangan unik (tidak umum), menggambarkan bahwa di antara anggota masyarakat baik secara personal maupun kolektif masih terdapat warga negara yang selama ini tidak mendapatkan perlakuan semestinya oleh negara, penyelenggara negara, masyarakat, ekonomi-sosial maupun sistem nilai dan norma yang diberlakukan. Siluet tanda seru dalam kotak percakapan, melambangkan bahwa saat ini, tidak seorangpun boleh “ditinggalkan” atau dibiarkan termarginalkan. Filosofi bendera tersebut sebagai ekspresi bahwa siapa saja boleh bersuara. Siapa saja, di mana saja, dan untuk persoalan apa saja, dalam batas bingkai yang memanusiakan setiap orang.

3.1.3. Misi Organisasi

Misi adalah cara dan tujuan yang harus dicapai dalam waktu jangka pendek. jika tidak terdapat misi pada organisasi maka akan terjadi kebingungan apa yang akan dikerjakan dalam organisasi tersebut. Misi organisasi PPWI bisa dilihat dari program jangka pendek dan menengahnya, yaitu : (1) mendorong dan mendukung aktivitas menulis setiap anggotanya dan masyarakat. umum; (2) mengadvokasi dan memberikan perlindungan bagi setiap anggota PPWI dan masyarakat umum

dalam setiap kegiatan jurnalisme warga yang dilaksanakannya; (3) mengadakan dan pendidikan dan latihan jurnalisme warga bagi anggota dan masyarakat umum, baik warta tulis warta foto maupun warta video; (4) mengadakan kegiatan temu pewarta warga baik skala lokal, regional nasional maupun internasional; (5) berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penanggulangan bencana, perlindungan lingkungan, hutan dan satwa, peningkatan taraf kesehatan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain: (6), menyediakan wadah berbagi informasi dan berita di antara sesama warga masyarakat berbentuk portal berita nasional dengan situs berita resmi, www.pewarta-indonesia.com; (7) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan elemen di masyarakat baik formal maupun informal, baik kelembagaan maupun personal; (8). Penerbitan kartu anggota yang sekaligus berfungsi sebagai *Citizen Reporter ID*.

Sejumlah program yang telah dilakukan PPWI bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Kegiatan PPWI

No	Nama Kegiatan	Tahun	Tempat & Kota
1	Penanaman pohon bersama	2008	Jakarta Pusat
2	Seminar pengembangan potensi menulis	2009	Universitas Maranatha Bandung
3	Temu pewarta warga se-Bandung	2010	Universitas negeri Sunan Gunung Jati Bandung
4	Seminar jurnalistik pewarta warga	2010	Universitas Jayabaya Jakarta
5	Pendidikan dan pelatihan citizen reporter	2008-2011	Gedung Dewan Pers Jakarta
6	Workshop Intensif Jurnalistik II	2009	kerjasama PPWI Yogyakarta dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan berbagai media massa di wilayah tersebut.
7	Pendidikan dan pelatihan citizen reporter bagi perwira dan bintara TNI angkatan darat	2008	Jakarta
8	Seminar sehari becoming extraordinary kerjasama dengan The Young Spirit	2008	Gedung Dewan Pers Jakarta

9	Sosialisasi (keterbukaan informasi Publik dan UU ITE (Informasi Teknologi dan Elektronika) kerjasama dengan Departemen Kominfo	2009	Jakarta
10	Festival Sisingaan Mini di Subang		Jawa Barat, hasil kerjasama dengan Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
11	Seminar Internasional dengan tema "Saatnya Guru Menulis"		Padangpanjang, kerjasama PPWI Padangpanjang dengan pemerintah daerah dan Diniyah Putri Padangpanjang
12	Mengikuti pameran pada acara Pameran INKOWAPI (Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia)		Grand Hall Thamrin City, Kebon Kacang, Jakarta Pusat.
13	Seminar Internasional tentang Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi di Siak Sri Indrapura		Riau, kerjasama PPWI Siak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan berbagai organisasi di wilayah tersebut
14	Pendidikan dan latihan jurnalistik bagi siswa SLTA dan humas pemerintah daerah Kabupaten Pati		Pati Jawa Tengah, kerjasama PPWI Jateng dengan Pemda dan beberapa mitra kerja.
15	Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional		Subang, hasil kerjasama PPWI dengan Kementerian Agama Kabupaten Subang, dan organisasi PMII Subang.
16	Dialog antar Generasi bagi Guru-guru PPKN se Sulawesi		Manado, kerjasama PPWI dengan Kesbangpol Kemdagri
17	Workshop on Media Relationship bagi Wartawan dan Pejabat Kehumasan		Kota Padangpanjang, Sumatera Barat.
18	Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tingkat		Luwu, Sulawesi Selatan, hasil kerjasama PPWI Luwu dengan Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.
19	Penerbitan ID Card Citizen Reporter bagi anggota PPWI dalam dan luar negeri, termasuk kepada lebih dari 200 wartawan warga dari kalangan TNI.	2008-2011	

Dalam rangka menjalankan salah satu misinya, PPWI memprogramkan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) menulis dan fotografi bagi anggotanya

dan masyarakat umum. Diklat ini bertujuan untuk memberikan bekal dasar bagi setiap orang yang ingin memberikan kontribusi bagi pemberitaan di media massa yang baik dan bertanggung jawab.

Sasaran utama program ini adalah masyarakat pelaku jurnalisme warga (anggota PPWI dan masyarakat umum) agar mereka memiliki kemampuan jurnalistik dasar yang diperlukan dalam menghasilkan informasi (artikel, reportase/laporan, berita foto, *press release*, dan lain-lain) yang baik dan informatif. Berkaitan dengan maksud tersebut, materi diklat disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang notabene masyarakat biasa, sehingga diklat dilaksanakan dengan pola prosentase 10% teori dan 90% praktik. PPWI melaksanakan program ini dengan jadwal yang sangat fleksibel, dengan durasi waktu yang juga disesuaikan dengan ketersediaan waktu peserta, serta materi yang benar-benar menjadi kebutuhan masing-masing.

Perihal diklat ini Wilson Lalengke berargumen :

.....kita belajar bersama-sama, sehingga kita memberi training, kita adakan diklat-diklat di mana-mana, di setiap kesempatan. Ada mahasiswa yang mengundang kita, semacam seminar, diklat di pemerintahan seperti di depdiknas, kita akan bantu. Sekarang ini, kita banyak dikontak oleh pihak TNI AD

Program kegiatan PPWI menurut pengamatan Wilson dari tahun ke tahun sudah semakin berkembang baik. Dengan dukungan dan kerja keras pengurus dan anggota PPWI di daerah-daerah, berbagai kegiatan, terutama di bidang edukasi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

.....Bercermin dari pencapaian kemajuan PPWI di tahun 2010, segenap pengurus dan anggota PPWI sangat optimis untuk melakukan akselerasi program kegiatan di tahun 2011. Semangat itu didukung juga oleh spirit angka 2011 yang pada tahun tersebut, PPWI akan merayakan Ulang Tahun-nya yang ke-4, tepat pada tanggal 11 November 2011 atau 11-11-11, the triple eleven! Tentu saja, dukungan dan kerjasama yang harmonis sesuai salah satu motto PPWI: “berkolaborasi, bukan kompetisi, apalagi bertikai” akan menjadikan proses bekerja-berkarya kita

selama tahun 2011 akan berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.....

3.1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan perwujudan struktur organisasi formal dengan jalan menganalisis jabatan-jabatan apa yang harus diperlukan dalam mencapai tujuan untuk kemudian menentukan kualifikasi maupun jumlah orang yang diperlukan untuk mengisi jabatan-jabatan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi yang dibentuk akan selalu berdasarkan pada 3 komponen organisasi yaitu, interaksi kemanusiaan, kegiatan yang terarah ke tujuan, dan struktur. Berdasarkan ketiga komponen organisasi itu seorang manajer puncak harus dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatan anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Di samping pertimbangan ketiga komponen tersebut, struktur organisasi harus memberi penjelasan bagaimana pembagian kekuasaan (*authority/wewenang*), dan bagaimana tanggung jawabnya. Pendelegasian wewenang sangat erat hubungannya dengan batasan wewenang dan tanggung jawab seseorang tentang suatu bagian kegiatan yang dilaksanakan. Dengan menugaskan sebagian pekerjaan kepada bawahan berarti manajer memberikan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang, untuk kemudian setiap bawahan harus mempertanggungjawabkannya kepada atasannya sesuai dengan struktur organisasi.

PPWI masih merupakan satu-satunya lembaga citizen jurnalis resmi yang ada di Indonesia. PPWI mulai aktif sejak tanggal 11 Nopember 2007, dengan pelopor/pendiri dan Ketua Umum Wilson Lalengke. Berikut ini susunan kepengurusan PPWI pusat, daerah dan cabang.

Tabel 3. 2

Dewan Pengurus Nasional PPWI Periode 2007-2012

Dewan	Nama Dewan
Dewan Pendiri	Supriyanto, SH Wendi Razif Soetikno
Dewan Penasihat	Ir. Ricardo MH. Siagian, M.T. Ir. Sarwono Kusumaatmaja Supani, SH

			Ir. Marwan Batubara, M.Sc Edy Mulyadi
Dewan Pengurus	Ketua	Umum	Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA
		I	Mung Pujanarko, S.Sos
		II	Aldy Madjid (demisioner)
	Sekretaris	Jenderal	Ruslan Andy Chandra, Dipl.PR
		I	Fredy A. Tewu
		II	Yanti Sugiyanti
	Bendahara	Umum	Krisna Yudha Caraka
		I	Ernia Sari
		II	Winarsih, S.Pd
	Biro	Hukum & Advokasi	Muspani, SH
		Litbang & Diklat	Dodi Mawardi, Candra Kirana, SH
		Organisasi	Hilda Perbatasari
		Usaha & Keuangan	Deisy Wong
Humas & Publikasi		Rio Bembo Setiawan	
Sekretariat		Yosef Ferdiyana	
Data & Informasi		Irwanto	

Sumber : Situs PPWI

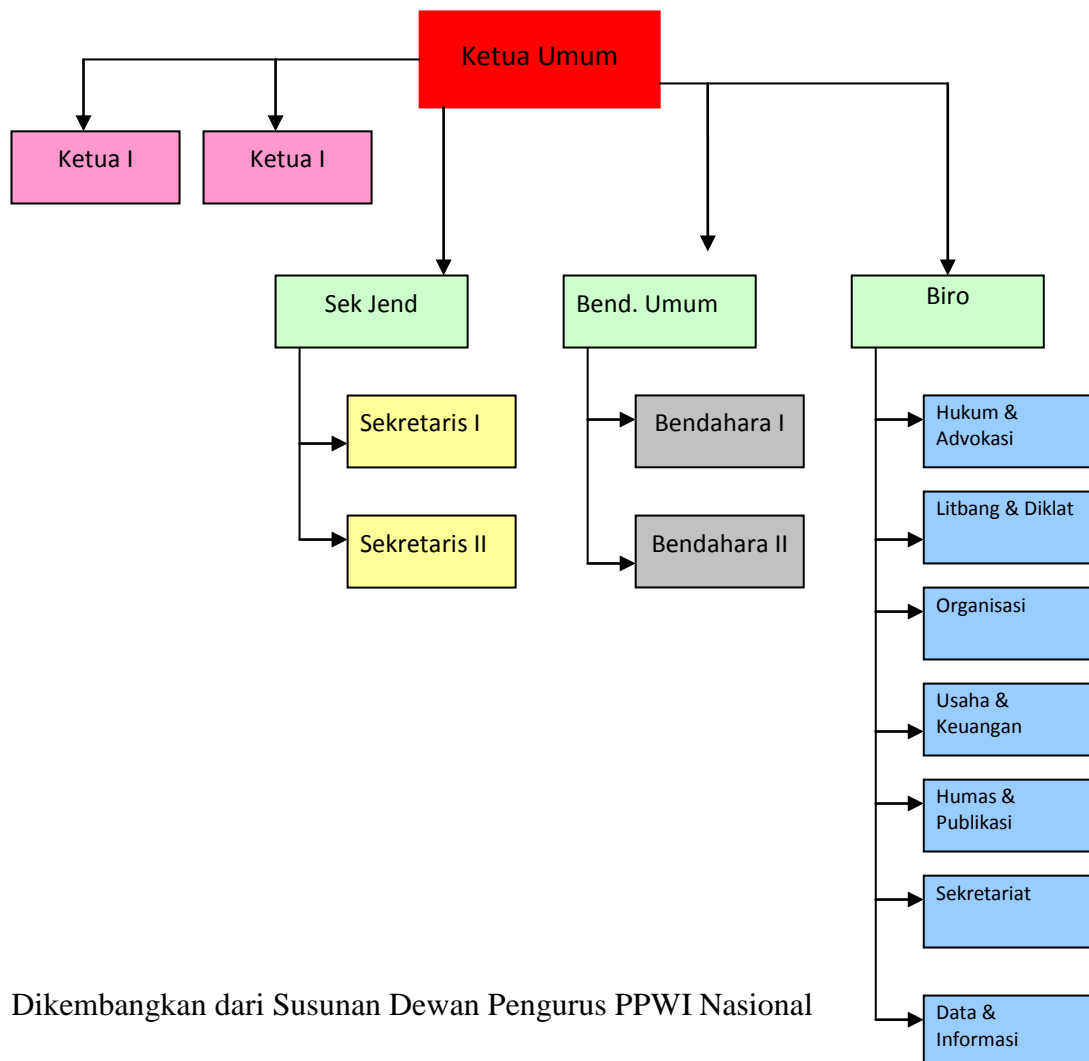
Dewan Pengurus Nasional PPWI terdiri dari dewan pendiri, dewan penasihat dan dewan pengurus yang melingkupi ketua umum, ketua I dan II, bendahara umum, bendahara I dan II, sekretaris jenderal, dan biro (hukum dan advokasi, litbang dan diklat, organisasi, usaha dan keuangan, humas dan publikasi, sekretariat, data dan informasi).

Sebagai pendiri, Wilson Lalengke kemudian dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional PPWI yang bermarkas di Jakarta. Sehari-hari berkantor di sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Senayan, Jakarta, dan menjadi dosen *philosophy and character building* di Universitas Bina Nusantara. Untuk urusan PPWI, Wilson Lalengke yang merupakan staf dari DPD DPR RI mencantumkan nama Sony Lalengke untuk jabatannya sebagai ketua umum PPWI.

Sebagai dewan penasihat, dipasang nama-nama orang terkenal, atau pun figure yang pernah menjadi pejabat, seperti Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Ir. Ricardo MH Siagian, M.T, M.Sc, yang saat ini menjabat Komandan

Sekolah Kajian Strategi dan Pertahanan dan Strategi Unhan, sekaligus staf khusus Panglima TNI. Ada juga Ir. Sarwono Kusumaatmaja, mantan menteri pendayagunaan aparatur negara pada masa Orde Baru, serta Ir Marwan Batubara, MSc, mantan General Manager PT Indosat ini meraih kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta. Marwan juga merupakan aktivis sosial, penggagas pendirian Yayasan Ummat (Ummat Muslim Indosat), sebuah yayasan yang banyak membantu memberikan pinjaman modal bagi pengusaha kecil. Marwan juga aktif sebagai Ketua Yayasan Tanmia, yang bersama-sama dengan Yayasan DSUQ mendirikan dan mengoperasikan klinik gratis di kawasan-kawasan kumuh seperti di Pulo Gadung, Cilincing, Ancol, Krukut, dan Grogol.

Diagram 3.1. Struktur Organisasi DPN PPWI



Tabel 3.3
Ketua dan Dewan Pembina DPD-DPC PPWI

No	Daerah		Nama Pengurus
1	DPD Sulawesi Utara	Dewan Pembina	Gubernur Sulawesi Utara Kapolda Sulawesi Utara Danrem 131 Santiago Kajati Sulawesi Utara
		Ketua	Fenly Sigar, SE
2	DPD Sumatera Utara	Dewan Pembina	Faisal Yusuf Nasution Prof. Dr. Syukur Kholil, MA Prof. Dr. Swardi Lubis, MS Samidi, M.Pd
		Ketua	Winda Kustiawan, MA
3	DPD Sulawesi Selatan	Dewan Pembina	Dr. Armin Arsyad, M.Si Andy Soekry Awal
		Ketua	Muslimin Beta, S.Sos
4	DPD Jawa Tengah	Dewan Pembina	Totok Supriyadi, SH. Eko Supriyanto, SH. Yunus Budiarto, S Pd.
		Ketua	Bambang Nurharyadi
5	DPD Yogyakarta	Dewan Pembina	Drs. H. Kasturi
		Ketua	Supadiyanto
6	DPD Sulawesi Tenggara	Dewan Pembina	Dr. H. Hino Biohanis Drs. H. Harun Haeba Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, PhD
		Ketua	Abdurrahman, SP
7	DPD Sumatera Selatan	Dewan Pembina	Dr. Ismail Sukardi, M.Ag Riza Pahlevi, M.A.
		Ketua	Afriantoni, M.Pd.I
8	DPC Blitar	Dewan Pembina	Heru Sunariyanta, SH Guntur Wahono, SE Sulin, SH, MKn
		Ketua	Bambang Sunarso
9	DPC Malang	Dewan Pembina	Drs. Suhidno
		Ketua	Kasiyanto
10	DPC Luwu	Dewan Pembina	Obe Hasrianto H.M. Yudas Amir Muhdar
		Ketua	Muchlisin

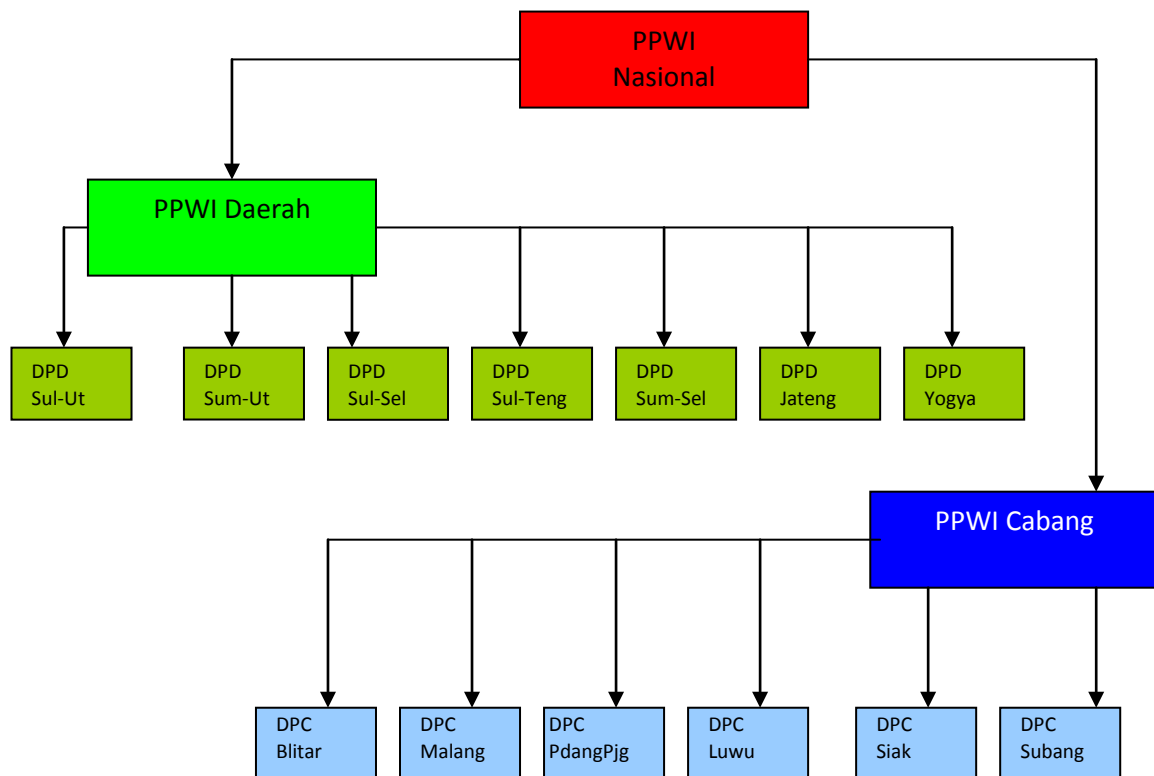
11	DPC Padang Panjang	Dewan Pembina	dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR Ir. H. Edwin, SP Prof. Dr. Mahdi Bahar, S.Kar, M.Hum Taufik, S.Ag, M.Pd Sulaiman Juned, S.Sn, M.Sn.
		Ketua	Musriadi Musanif, S.Th.I
12	DPC Siak	Dewan Pembina	Bupati Siak H. Hasrin Saily (Tokoh masyarakat) Budi Susianto (Praktisi media)
		Ketua	Hermawan Hariadi
13	DPC Subang	Dewan Pembina	Ojang Sohandi Kaka Suminta Wawan Renggo
		Ketua	Asep Alamsyah Heridinata

Pembentukan kepengurusan PPWI di beberapa wilayah menurut Wilson telah menorehkan sesuatu yang amat penting bagi perkembangan tidak hanya organisasi PPWI tapi juga kegiatan keperwartaan-masyarakat secara meluas dan tertata baik. Setidaknya, dengan lahirnya 8 Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPWI dan 11 Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPWI akan membuka ruang yang lebih lebar bagi setiap anggota masyarakat untuk berkreasi-berkarya memaksimalkan potensi pikir dan kreativitas masing-masing dalam mengekspresikan kehendak alamiahnya sebagai manusia yang memiliki harapan, cita-cita, dan inspirasi bagi masa depannya baik secara individu maupun bersama-sama anggota komunitasnya.

Hingga Desember 2010, kepengurusan PPWI di daerah yang sudah terbentuk adalah sebagai berikut: DPD PPWI DI Yogyakarta, DPD PPWI Sumatera Selatan, DPD PPWI Sulawesi Tenggara, DPD PPWI Jawa Tengah, DPD PPWI Sulawesi Selatan, DPD PPWI Sumatera Utara, DPD PPWI Sulawesi Utara, DPD PPWI Sulawesi Barat, DPC PPWI Subang (Jawa Barat), DPC PPWI Siak (Riau), DPC PPWI Padangpanjang (Sumatera Barat), DPC PPWI Luwu (Sulawesi Selatan), DPC PPWI Malang (Jawa Timur), DPC PPWI Blitar (Jawa Timur), DPC PPWI Minahasa (Sulawesi Utara), DPC PPWI Labuhanbatu

(Sumatera Utara), DPC PPWI Selayar (Sulawesi Selatan), DPC PPWI Manado (Sulawesi Utara), DPC PPWI Pelalawan (Riau).

Diagram 3.2. Struktur Dewan Kepengurusan PPWI



Dikembangkan dari Situs PPWI

Kepengurusan PPWI di berbagai wilayah tersebut di atas didedikasikan kepada masyarakat, dan bertugas sebagai ujung tombak bagi sebuah perubahan dan kemajuan peradaban masyarakat Indonesia, melalui pembangunan paradigma baru dalam “mengunyah dan mencerna” informasi yang disajikan oleh media massa.

.....kita di pusat cenderung berpikir bahwa yang paling penting adalah bahwa niatan adanya eksistensi kita harus jelas. Maka yang perlu kita pikirkan itu bukan masyarakat di luar tapi justru anggota-anggota pengurus untuk menjaga anggota-

anggota kita agar betul betul konsisten dengan garis pedoman organisasi.....

Dengan keberadaan kepengurusan PPWI di tengah-tengah masyarakat, Wilson yakin setiap orang dan komunitas akan memiliki semangat dan keteguhan hati untuk mengambil bagian dalam kerja besar berbagi informasi antar anggota masyarakat menggunakan media massa. Hal ini penting terutama jika dikaitkan dengan budaya transparansi dan akuntabilitas di masyarakat yang masih tergolong rendah antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, terutama dari pihak pemegang otoritas politik, sosial, dan ekonomi.

....Keraguan untuk berkarya-mewartakan menggunakan segala sarana/prasaran media yang ada kiranya tidak lagi menghinggapi setiap warga, sehingga kebutuhan manusiawi kita untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi seluas-luasnya dapat terpenuhi....

3.1.5. Aturan-Aturan

Dalam berorganisasi sangat diperlukan adanya aturan karena jika tidak ada aturan maka akan terjadi konflik kepentingan. Aturan dalam organisasi bisa berupa undang-undang dan kode etik.

Demi tegaknya harkat dan martabat maupun mutu dari hasil karya para pewarta warga, maka PPWI menetapkan kode etik pewarta warga yang harus ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh anggota PPWI, yang secara rinci seperti tertuang sebagai berikut : (1) Pewarta warga tidak menyiarkan berita yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara maupun kesatuan dan persatuan bangsa; (2) Pewarta warga tidak diperkenankan menyiarkan karya jurnalistik melalui media massa apapun yang bersifat cabul, menyesatkan, bersifat fitnah ataupun memutarbalikkan fakta; (3) Pewarta warga tidak diperkenankan menerima imbalan yang dapat mempengaruhi obyektivitas beritanya; (4). Pewarta warga menjaga dan menghormati kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita-berita yang dapat merugikan nama baik seseorang atau pihak tertentu; (5) Pewarta warga dilarang melakukan tindakan plagiat atau mengutip hasil karya

pihak lain dengan tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila kenyataannya nama maupun identitas sumber berita tidak dicantumkan, maka segala tanggung jawab ada pada pewarta warga yang bersangkutan; (6). Pewarta warga diwajibkan menempuh cara yang sopan dan terhormat dalam memperoleh bahan karya jurnalistik, tanpa paksaan ataupun menyadap berita dengan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan; (7) Pewarta warga diwajibkan mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang ternyata tidak akurat, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan hak jawab; (8) Dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan proses hukum atau diduga menyangkut pelanggaran hukum, pewarta warga harus selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dengan prinsip jujur, dan menyajikan berita secara berimbang; (9) Pewarta warga harus berusaha semaksimal mungkin dalam pemberitaan kejahatan susila (asusila) agar tidak merugikan pihak korban; (10) Pewarta warga menghormati dan menjunjung tinggi ketentuan embargo untuk tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita telah dinyatakan sebagai bahan berita yang *‘off the record’*.

Kode etik pewarta warga pada hakikatnya dimaksudkan sebagai rambu-panduan bagi setiap aktivis jurnalisme warga. Kode etik tidak dimaksudkan untuk memberikan pembatasan atas hak-hak individu anggota PPWI dan masyarakat umum dalam menyampaikan aspirasi dan informasi ke ruang publik. Oleh karena itu, menurut Wilson, pengawasan pelaksanaan kode etik ini seyogyanya dilaksanakan oleh masing-masing anggota pewarta warga, dan masyarakat di lingkungan sosial masing-masing. Demikian juga, sanksi atas pelanggaran kode etik ini juga lebih diserahkan kepada sistem sosial (nilai dan norma) yang berlaku di masyarakat. Untuk pelanggaran yang bersifat normatif, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum; dan untuk hal-hal yang berkenaan dengan nilai sosial, diharapkan peran sangsi dan kontrol sosial masyarakat yang menyelesaikan.

.....walaupun demikian, PPWI melalui Biro Hukum akan senantiasa memberikan advokasi atas segala kegiatan pewarta warga, termasuk perlindungan hukum dan sosial.

Selain kode etik, PPWI juga menerapkan norma sebagai berikut : (1) Redaksi PPWI tidak bertanggungjawab atas isi (konten) yang berupa teks, gambar atau material lainnya yang *diupload* dan diunggah di situs pewarta warga; (2) PPWI tidak menjamin semua tulisan yang dikirimkan akan ditayangkan; (3) Penolakan tulisan tidak akan dikomentari dan juga tidak bisa diganggu gugat lagi; (4) Pelanggaran dari etika akan mengakibatkan pencekalan atau pencabutan hak sebagai penulis; (5). Redaksi berhak mengedit maupun mempersingkat isi berita jika berita itu terlalu panjang; (6). Nama penulis akan selalu ditayangkan bersama dengan beritanya; (7) PPWI tidak bertanggungjawab atas komentar isi maupun kritikan terhadap isi; (8). Anggota berhak mengirimkan foto yang sesuai dengan berita yang dikirimkan namun redaksi PPWI berhak menolak ataupun mengganti foto tersebut; (9) Redaksi PPWI memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan di mana, kapan dan berapa lama berita bisa ditayangkan; 10) Redaksi PPWI tidak dapat dibebani beban tanggungjawab atas kerusakan dalam bentuk apapun yang terjadi secara berkala maupun tidak langsung.

3.1.6. Profesionalisme

Profesionalisme adalah perilaku, tujuan dan kualitas yang sangat tinggi dan konsisten yang memberi ciri kepada profesi seseorang. Dalam organisasi perlu adanya profesionalisme dalam praktik kerja keorganisasian tersebut. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya, jika tidak ada sikap profesionalisme di dalam berorganisasi maka hasilnya pun akan resah. Di dalam organisasi PPWI, profesionalisme bisa dilihat dari kinerja para pengurus serta peran aktif para anggotanya yang difasilitasi oleh organisasi.

Untuk menjaga profesionalisme PPWI dari sudut pemberitaan para pewarta warga, Supadiyanto, Ketua DPD PPWI Yogya menyeleksi tulisan-tulisan yang masuk setiap hatinya.

.....Yang pasti EYD. Karena baru pemula, tulisannya masih agak kurang bagus. Supaya tulisannya lebih bermutu, ya harus ada yang harus diperbaiki

Selain editor, di situs pewarta warga, ada beberapa admin yang bertugas menyeleksi berita-berita yang dikirimkan namun sebatas pada tata bahasa, bukan pada substansi. Karena seringkali tulisan tersebut berbicara soal SARA atau pada persoalan kritik dengan penyajian kalimat-kalimat yang pedas mengarah satu pihak.

Sedang Wilson Lalengke menyebutkan untuk menjaga profesionalisme PPWI membekali anggota pewarta warga dengan pengetahuan dan ketrampilan reportase (atau investigasi) yang benar dan beretika-yang menurut Wilson, beretika ini amat jauh dari insan pers media *mainstream*. Juga, membekali setiap pewarta dengan ID Card dan pengetahuan, ketrampilan dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi situasi sulit. Kata Wilson, prinsip mencegah lebih baik dari mengobati adalah hal utama yang perlu menjadi keseharian seorang reporter.

Bambang Nurharyadi menyebut profesionalitas para pewarta warga bisa ditafsirkan profesional dalam tanda petik, bukan profesional seperti halnya wartawan media *mainstream*. Karena itulah Bambang mengelak jika para pewarta warga akan memanfaatkan statusnya sebagai “wartawan profesional” ini untuk memeras.

....ini mohon maaf, pewarta warga itu mungkin tidak bisa mengkhususkan seperti apa yang dikatakan hanya wartawan profesional yang tahu detail bagaimana caranya mendapatkan amplop, tapi pewarta warga justru tidak karena ada kontak langsung. Warga-warga ini tak tahu bagaimana sih caranya untuk memojokkan orang atau narasumber.....

ID card menurut Wilson hanya sebagai identitas seperti halnya KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa. Ketika berada di suatu tempat, kartu ini sebagai penunjuk identitas saat ditanya.

...Jadi sebatas menunjukkan. Tapi kalau akhirnya berfungsi sebagai kartu untuk meliput itu sah sah saja semua orang kan punya hak mengetahui tidak harus wartawan tidak harus orang punya kartu PWI kita pun punya hak untuk cari tahu

Wilson Lalengke menegaskan bahwa pemberian kartu identitas sebagai wujud ungkapan kepedulian berlandaskan kasih-sayang yang tulus kepada para penggiat jurnalisme warta di mana saja berada, dan dari media apa saja yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Kartu anggota PPWI ini berlaku sama dengan kartu anggota PPWI yang sudah dikeluarkan selama ini dengan masa berlaku lima tahun, dan mendapatkan hak yang sama bagi setiap pemegangnya. Kartu tersebut juga sekaligus berfungsi sebagai citizen journalist *ID card*, yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai data dan informasi publik di mana saja dan dari pihak manapun.

Gambar 3.2. Kartu PPWI



Cara mendapatkannya amat mudah dan bisa diperoleh oleh siapa saja yang membutuhkannya. Beberapa persyaratan umum bagi pemegang kartu adalah bersedia mematuhi kode etik pewarta warga Indonesia, mendaftarkan diri dengan mengirim formulir anggota yang dapat didownload di situs Pewarta Indonesia, disertai *scanning* identitas diri (KTP/SIM/paspor/kartu mahasiswa/kartu pelajar, dan lain-lain), ditambah file foto diri ke email pengurus : ppwi@pewarta-indonesia.com, mempunyai alamat blog/situs pribadi yang sudah aktif dan masih

aktif minimal dalam satu bulan terakhir, dan bersedia agar link alamat blog/situs tersebut bisa ditempelkan di situs *www.pewarta-indonesia.com*, bersedia menempatkan logo PPWI dengan *link* akses ke *www.pewarta-indonesia.com* di blog pribadi masing-masing, mendaftarkan diri menjadi *citizen journalist* (pewartar warga) di media maya Pewarta Indonesia DotCom pada *www.pewarta-indonesia.com*, mengirimkan satu artikel terbaik jenis rubrik apa saja, hasil karya sendiri (terbaik menurut masing-masing, bukan terbaik menurut redaksi atau orang lain) ke situs *www.pewarta-indonesia.com*. Pengiriman artikel dilakukan via menu "Kirim Warta" yang akan tampil di situs ini setelah user masuk (*log-in*), dan bersedia mengganti biaya kartu dan ongkos kirim sebesar Rp 150 ribu.

Harapannya, melalui program ini kegiatan jurnalisme warga akan semakin berkembang dengan kegairahan baru menuju masyarakat madani (*citizen society*) yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya kartu anggota CJ dari PPWI bagi para anggota dan masyarakat umum, kegiatan mengumpulkan dan membagikan informasi kepada sesama warga masyarakat tidak harus terbentur hambatan birokrasi atau kendala lain yang tidak perlu. Kesulitan mengakses data dan informasi publik bagi penggiat pewarta warga (non-wartawan profesional) dari berbagai pihak dan instansi kiranya akan teratasi.

3.1.7. Insentif

Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi anggota organisasi agar produktivitasnya tinggi. Pada dasarnya pemberian insentif bukanlah hak tetapi penghormatan terhadap anggota organisasi yang telah menunjukkan kemampuannya dan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya hal ini dimaksudkan untuk memotivasi kerja.

Pemberian insentif bisa berupa penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada anggota organisasi agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Insentif adalah dorongan agar seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar dapat mencapai produktivitas yang tinggi

sehingga dapat membangkitkan gairah kerja dan motivasi yang tinggi. Jika tidak ada insentif pergerakan organisasi akan lamban.

Perihal insentif ini, anggota pewarta warga yang mengirimkan tulisannya menurut Supadiyanto belum diberikan insentif.

....di media Pewarta Indonesia itu belum ada. Dari kabar Indonesia belum juga. Hampir semua media yang lingkupnya pewarta warga tidak digaji termasuk. Jadi di sana ngirim berita, semua tidak ada honornya kecuali kita ngirim tulisan di media media konvensional ...

Namun Wilson memberikan pernyataan yang sedikit berbeda dengan Supadiyanto. Bahwa PPWI sering memberikan *rewards* dalam berbagai bentuk. Situs pewarta warga misalnya membuka lomba penulisan dan pemenangnya mendapatkan hadiah. Atau sering penulis-penulis PPWI mengirim tulisan, artikel, dan foto yang kemudian diikutkan lomba. Ada beberapa pewarta warga yang sudah mendapatkan juara. Artikel atau pun foto selain masuk ke situs Pewarta Indonesia. PPWI juga memberikan *rewards* berupa sertifikat, suvenir dalam bentuk pin. *Rewards* tersebut diberikan bukan saja kepada anggota pewarta warga. Dengan demikian PPWI memberikan insentif kategori non material (gelar, tanda jasa/medali, piagam penghargaan, pujian tertulis maupun tidak tertulis, ucapan terima kasih, dan sebagainya)

....warga masyarakat yang memberikan andil kepada pengembangan citizen jurnalis, kita sediakan penghargaan, kita berikan penghargaan, memang sejauh ini yang lebih banyak kita mampu lakukan adalah memberikan penghargaan sertifikat. Belum dalam pengertian kita memberikan uang. Belum sampai situ. Dalam 3 tahun ini memang kita juga masih coba konsolidasi bagaimana supaya organisasi ini bisa hidup ya. Artinya kita belum sampai pada menghasilkan uang sendiri ya. Memang ini moril revoluter. Tapi sejauh itu dilakukan dengan hepi, dengan ikhlas saya kira satu tujuan.....

Meski tidak memberikan honor, untuk kasus-kasus khusus, misalnya anggota pewarta warga yang rutin mengirimkan tulisan, foto atau video dan

memiliki *track record* bagus, PPWI akan memberikan penghargaan dalam bentuk rupiah, meskipun jumlahnya tidak besar. Bagaimanapun menurut Wilson, mereka sudah mengeluarkan keringat, mengeluarkan potensinya :*kita harga, tapi kan akhirnya juga ketuanya juga yang harus, ya gitu sayalah yang nyumbang.....*

Dengan demikian, keanggotaan dan pengurusnya sifatnya sukarela, dalam pengertian tidak digaji. Meski demikian ada dua pengurus PPWI yang digaji, yaitu bagian sekretariat terutama yang mengurus surat-menyurat dan penyediaan kartu.

Perihal kartu anggota, PPWI yang mematok biaya keanggotaan Rp 150 ribu, yang berlaku selama 5 tahun, sering dipertanyakan. Iuran tersebut ditarik dengan asumsi, anggota setiap bulannya menyumbang sekitar Rp 5000 kepada organisasi.

...kalau itu tidak dipungut bulanan kan agak sulit apalagi yang di Papua sana, kan susah. Jadi kita ambil keputusan tarik depan seratus lima puluh ribu tapi kartunya berlangsung lima tahun. Tanpa kartu itupun sebenarnya sudah bisa dikenali. Tapi persoalannya adalah ketika kita ingin punya kartu. Tentu sudah ada komitmen di sana. Seratus 150 itu pun kadang-kadang ada rasa bagaimana. Kalau mahasiswa ya dia minta diskon.....

Di dalam PPWI, kemandirian soal pendanaan sangat diutamakan. : ... *dari awal kita mandiri, jadi kita tidak ingin bergantung dari pihak lain..*

Namun PPWI tidak menolak jika ada kerjasama kegiatan, misalnya seminar yang dilaksanakan depdiknas atau kampus. Sponsornya institusi masing-masing, pihak PPWI mengirim orang-orang yang berkompeten sebagai pembicara, narasumber atau *trainer*.

....mereka itu ya sponsor itu yang bayar tapi kalau tidak ya terpaksa kita iuran masing-masing. Kalau satu hari misalnya mereka untuk makan siang dan sebagainya 50 ribu itu....Kalau teman kita jadi anggota DPR kan bisa dialokasikan dana untuk diarahkan kepada dana pelatihan peningkatan SDM

PPWI sendiri menurut Wilson juga mengadakan kerjasama dengan sejumlah instansi, misalnya untuk pelatihan, iklan, pengadaan lomba. Seperti yang terlihat di situs PPWI, terlihat ada pemberitaan tentang PT Sido Muncul.

....dengan kerjasama tadi pasti itu kan ada sisa, omsetnya sekitar 50-an juta, dan itu yang kita pakai untuk menghidupi organisasi.....

3.1.8. Sumberdaya

Bicara sumber daya adalah bicara soal potensi atau kekuatan yang ada dan atau dimiliki baik seseorang, suatu kelompok maupun suatu lembaga atau organisasi. Sumberdaya berupa sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, sumberdaya keuangan, sumberdaya informasi, sumberdaya alam

Di antara lima unsur atau sumber daya, unsur manusia menjadi sumber daya strategis yang menentukan keberhasilan kinerja organisasi. Dikatakan strategis karena sumber daya atau potensi lainnya diatur dan dikendalikan oleh sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia tampil dalam dua kelompok, yaitu kelompok pimpinan (manajemen skill dan *technical skill*) dan kelompok bawahan, *staffing*, atau anggota.

Dengan demikian pimpinan/manajer adalah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan pimpinanlah yang bertanggung jawab penuh mengatur strategi pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manajemen sebuah unit secara berjenjang termasuk di dalamnya pengembangan SDM. Jadi maju-mundurnya kualitas SDM, bermanfaat atau tidaknya potensi manajemen sebuah organisasi ada di tangan pimpinan organisasi.

Sumberdaya utama dari PPWI tentu saja adalah para pewarta warga, yaitu mereka yang memiliki hobi menulis, seperti para *blogger*, anggota millis, kontributor *freelance* media online, pemberi komentar pada berbagai artikel, dan lain-lain. Mereka menulis tidak untuk media massa mainstream melainkan hanya

untuk berbagi informasi dan idealisme di antara sesama pembaca, antar warga masyarakat.

Mereka memiliki bakat, potensi, dan bahkan keterampilan yang baik sebagai penulis. Namun sayangnya mereka tidak diakui dan juga tidak memiliki wadah atau tempat di mana mereka bisa bergabung maupun mengekspresikan hasil karyanya, layaknya sebuah media massa konvensional. Yang lebih menyakitkan, pengakuan atas hasil karya tulis-menulis mereka juga hampir selalu tidak diakui oleh para penulis profesional bahkan dicibirkan sebagai penulis amatiran. Ribuan lembar artikel dan berita yang ditulis oleh para wartawan non-profesional tersebut hanya masuk tong sampah redaktur surat kabar, majalah, tabloid, dan sejenisnya, tanpa dibaca dengan selayaknya. Salah satu keistimewaan PPWI adalah bahwa organisasinya yang bersifat global, sehingga semua wartawan warga Indonesia di pelosok dunia manapun juga bisa turut bergabung menjadi anggota, tanpa ada batasan dari segi pendidikan, umur, profesi, domisili, maupun kewarganegaraan.

Sebagai sebuah organisasi resmi, PPWI semestinya memiliki sumber daya fisik berupa perkantoran sebagai tempat aktivitas kegiatan PPWI, baik itu milik sendiri, berstatus menyewa, hibah, atau bantuan pakai. Di situs Pewarta Warga disebutkan PPWI mempunyai kantor yang beralamatkan di Gedung Dewan Pers Lt. 5 Jl. Kebon Sirih Raya 32-34 Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini juga merupakan kantor dari Persatuan Wartawan Indonesia. Saat peneliti hendak *interview* Wilson Lalengke, Ketua PPWI, ternyata Wilson sudah tidak lagi berkantor di sana. Menurut keterangan petugas keamanan, PPWI sudah setahun tidak lagi berkantor di Gedung Dewan Pers. Hal tersebut juga diakui oleh Wilson Lalengke, bahwa saat ini PPWI tak lagi berkantor di Gedung Dewan Pers. Alasannya jika berkantor di sana, PPWI harus menggaji sejumlah pegawai, padahal pekerjaannya tidak efektif. Meski demikian untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman faksimili tetap dialamatkan ke Gedung Dewan Pers, dan hanya ada dua pegawai yang *standby* mengurus surat menyurat di sana. Jika ada tamu yang ingin bertemu dengan ketua PPWI atau anggota yang lain diarahkan ke Gedung DPD Gedung DPR/MPR Senayan. Karena sehari-hari, Wilson bekerja

sebagai staf kantor DPR DPR/MPR. Sehingga peneliti melakukan wawancara dengan Wilson di kantornya, Gedung DPD DPR/MPR.

3.1.9. Manajemen Organisasi

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen organisasi sebagai komponen dari administrasi dapat di tinjau dari tiga segi.

Pertama, kepemimpinan, tidak dimaksudkan melakukan sendiri kegiatan-kegiatan operasional akan tetapi menjamin orang lain mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kebijaksanaan, keputusan, dan pedoman yang telah diberikan. Kepemimpinan mempunyai dua atribut menurut Mellit yaitu personal dan institusional, Atribut-atribut personal kepemimpinan mencakup intelegensi, keberanian, integritas, kekuatan, kesiapan, fisik, determinasi, ketekunan, kerja keras, kecerdikan dan bahkan terkadang kebengisan, sedangkan atribut institusional kepemimpinan mencakup status, kekayaan, posisi, dan kolega atau teman yang mampu, kesempatan atau peluang yang khusus, suatu hubungan tertentu antara harapan atau aspirasi rakyat dengan penampilan kepemimpinan dan lain-lain. Atribut –atribut kepemimpinan, baik personal atau institusional akan sangat menentukan efektif tidaknya kepemimpinan. Dengan demikian seorang pemimpin memang di tuntutan mempunyai berbagai kelebihan dari yang dipimpin. Pertama, keunggulan emosional, keunggulan kecerdasan, keunggulan keterampilan, keunggulan fisik, kekayaan dan lain sebagainya.

Kedua, pengambilan keputusan, kesuksesan seorang pemimpin bukan hanya dilihat dari banyaknya jabatan atau pangkat saja. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana ia *manage* organisasi bersikap dan mengambil keputusan secara cermat, cerdas, dan cepat.

Ketiga, *human relations*, hasil dari kebulatan keputusan tadi pada proses tindak lanjutnya sebaiknya berpijak pada unsur kemanusiaan dan jika digerakkan

dengan tepat maka akan menjadi efisien dan jika tidak demikian maka terkadang manusia justru akan menjadi unsur perusak rencana (*destroyer of planning*). Wilson berupaya menggerakkan masyarakat umum untuk menjadi ‘wartawan’. Di bawah kepemimpinannya, PPWI telah memiliki kepengurusan daerah.

Suhardiman, pewarta warga anggota PPWI DPD Jawa Tengah menilai : *manajemen pengelolaan di PPWI Pati kurang bagus. Berbeda dengan Yogyakarta yang lebih andal.*

3.2. Situs Pewarta Indonesia

Pewarta Indonesia memiliki situs dengan alamat www.pewarta-indonesia.com dengan *tagline* ‘Pewarta Indonesia Community News by Citizen Journalist’. Situs ini memiliki sejumlah sub kolom seperti tertuang dalam tabel ini :

Tabel 3.4.
Kolom dan Rubrik Situs Pewarta Indonesia

Sub Website	Kolom
Beranda	Login, Search, Suara Warga, Warta Redaksi, Warta PPWI, Kolom Pewarta, Yang Terpinggirkan, Video Pewarta, Foto Pewarta, Statistik, Pewarta Online, Ruang Warga Bicara, Polling Warga, Mitra Pewarta
Warta Berita	Internasional, Nasional, Daerah, Pendidikan, Ekonomi, Hankam, Olahraga, Pariwisata, Hukum, Politik
Nusantara	Padang Panjang, Siak, Morowati, Sawahlunto, Tambak Buntu
Inspirasi	Opini, Profil, Sosial & Budaya, Rohani, Puisi, Cerpen-Cerbung, Resensi, Hiburan, Kuliner, Curhat, Serba-Serbi
Galeri	Foto, Video
Belajar Mewarta	Menulis Berita, Menulis Opini, Karangan Sastra, Tata Bahasa, Fotografi, Videografi
Pewarta Kopi	Profesional, Kontributor, Favorit
FAQ	
Redaksi	Dewan Redaksi, Biro Daerah, Kontak Redaksi, Warta Redaksi

PPWI	Selayang Pandang, Visi & Misi, Kode Etik, Panji & Atribut, Program Kerja, Pengurus Nasional, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Alamat Kontak, Formulir Anggota
Special Event	Warta PPWI, Ajang Lomba
Kolom Pewarta	Wilson Lalengke, Indonesia-Maroko, Imi Suryaputra

Beranda yaitu halaman muka yang ditampilkan saat *user* membuka situs Pewarta Indonesia. Sampai penelitian ini dibuat, beberapa tulisan yang bisa dibaca saat user membuka homenya antara lain dengan judul : ‘‘Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Padang Panjang Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1432 H/2011 M’’ , ‘‘SBY Pantas Dilengserkan’’ pada Warta Utama, ‘‘Lintas Timur Sulawesi di Gorontalo Primadona Lintas Ekonomi’’ pada Berita Terbaru, ‘‘Pengguguran Tabu atau Kesehatan’’ pada Opini. Ada juga Pengumuman Lomba Menulis Artikel Tingkat Nasional tentang RI-Maroko, pada warta PPWI. Banner, berisi kode-kode HTML beserta beberapa pilihan gambar. Dengan memasang banner ini maka logo Pewarta Warga akan kelihatan di home web, login dengan memasukkan alamat email dan *password*

Situs Pewarta warga dibuat menurut Supadiyanto karena pewarta warga hanya bisa diandalkan ketika ada internet. *Sementara di Indonesia teknologi internet baru tumbuh di kota, bagi orang-orang yang hidup di pedalaman, tidak ada internet sehingga para pewarta warga tidak bisa menyampaikan argumen.*

... kalau boleh saya menganalogikan bahwasanya teknologi internet itu dia sebagai ruang udara dia kena semuanya kena. Tapi kemudian yang tidak terkena, kekurangannya bisa tampil dalam media konvensional. Jadi saya bercita-cita membuat media cetak untuk pewarta warga.....

Bambang Nurharyadi menyebutkan bahwa media online menjadi sebuah keniscayaan lewat media *online*. Penyampaian warga sehari-hari bisa disampaikan melalui media *on line facebook, twitter, blog*.

3.3. Anggota PPWI

3.3.1. Karakteristik Pewarta Warga

Secara struktural, pewarta warga tak terikat dengan atau oleh media massa elektronik dan atau media massa jenis mana pun juga. Dengan begitu, mereka bisa jauh lebih bebas (leluasa) mengungkapkan pendapat maupun pikiran mereka masing-masing. Dalam sistem pewarta warga, posisi pembaca adalah raja, karena merekalah juga yang sekaligus menjadi penulis.

Masyarakat umum dengan tidak melepaskan profesinya masing-masing dapat berpartisipasi membagikan informasi dan idealisme yang dimilikinya kepada orang lain. Melalui keyakinan bahwa dengan bergerak bersama, menyalurkan aspirasi murni bersama secara langsung di media-media *citizen journalism*, sebuah bangsa lambat laut akan kuat mengubah kondisi bangsa dan negara ke arah yang dicita-citakan, bukan ke arah yang diinginkan segelintir orang di lingkaran media *mainstream*.

Menurut Supadiyanto, pewarta warga adalah orang-orang biasa (sipil) yang berkomitmen serius ingin mencerdaskan masyarakat luas melalui *sharing* berbagai informasi. Ia lebih merupakan sebuah kegiatan ranah/bidang jurnalistik di mana masyarakat (umum dari berbagai strata sosial), akan tetapi mereka secara aktif memainkan peran layaknya seorang wartawan atau melakukan kegiatan jurnalistik, yakni berpartisipasi memberikan kontribusi untuk mengumpulkan informasi, menulis berita, menganalisisnya, melaporkan dan menyiarkan agar bisa dikonsumsi oleh publik. Tidak ada syarat apapun untuk bisa menjadi pewarta warga, selain dia harus WNI karena memang warga tersebut adalah warga negara Indonesia.

Warga bisa melakukan perekaman atau bisa disebut peliputan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa itu beragam, bis bencana alam, kegiatan sosial, politik, budaya dan sebagainya.

.....pewarta warga adalah profesi yang patut disandang oleh para relawan yang secara ikhlas turut aktif dalam mengembangkan model jurnalisme yang mengedepankan hati nurani dan kejujuran (the soul and honest journalism).....

Sekalipun tak berkalung kartu pers, pewarta warga ini mampu melakukan reportase, investigasi, menulis berita dan menerbitkannya melalui media CJ. Selain sebagai pensuplai tulisan, sekaligus para pewarta warga ini juga berperan menjadi pembaca setia media-media berbasis CJ. Jika praktik CJ sudah melembaga maka kemungkinan banyak orang yang tak berkalung kartu pers mereka bisa menghasilkan karya jurnalistik. Seperti kata Wilson Lalengke : *ini akan berbanding terbalik dengan fenomena "wartawan bodrek" yang berkalung kartu pers tapi mereka miskin karya jurnalistik.*

Pewarta warga tidaklah dimaksudkan untuk membuat segalanya bebas tak terhalang apapun dalam mengekspresikan sebuah informasi yang dimiliki. Namun sistem ini, kata Bambang Nurharyadi lebih bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat biasa, bukan profesional, kepada media massa dari mulai pencarian informasi, penyajian hingga penggunaannya. Oleh karena itu dalam pengelolaannya setiap individu memikul beban tanggungjawab terhadap semua informasi yang dimiliki dan dibagikannya melalui tulisan di media massa. Dalam tanggungjawab tersebut terkandung tugas-tugas untuk menghasilkan tulisan yang benar, jujur, informatif serta bermanfaat bagi orang banyak.

Menghasilkan sebuah tulisan yang benar sesuai fakta, jujur tanpa tendensi negatif, tidak provokatif negatif dan seterusnya dapat dilakukan semua orang tanpa harus memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Bertugas sebagai *citizen reporter* justru akan menjadi wadah strategis bagi setiap orang untuk menjadi pewarta warga yang jujur, berdedikasi, memiliki jiwa sosial yang tinggi serta melatih diri untuk bertanggungjawab. Seluruh tulisan atau berita yang disampaikan kepada publik, tanggungjawab sepenuhnya berada pada si penulis

Kekuatan pewarta warga pada aspek kebebasan berbicara (memberikan informasi dan aspirasi publik) yang mendukung demokrasi yang sesungguhnya sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk memberikan kritik, informasi, opini dan saran dengan bebas tanpa harus takut terjerat hukum. Selain itu kekuatan dari pewarta warga yaitu mengalahkan media massa lain dalam hal aktualitas dan otentitas. Inilah modal besar pewarta warga

yang bisa menjadi kekuatan tiada tertandingi dalam memajukan peradaban sebuah bangsa.

Letak keistimewaan pewarta warga adalah ke-*volunteer*-annya, Keikhlasan dan sikap jujur yang dimodali para pewarta warga adalah modal utama untuk melejitkan kemampuan mereka dalam berolah kata, berolah nyali dan berolah pikiran untuk mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Selama ini, mayoritas orang hanya menjadi pengonsumsi informasi berbagai media massa.

Mereka sekadar menjadi pemirsa, pendengar dan pembaca yang setia berbagai media elektronik dan media cetak. Mereka sekadar, menjadi objek pasif yang menelan ‘mentah-mentah’, apa-apa yang disajikan koran, televisi, radio dan internet. Untuk mengubah posisi pembaca menjadi penulis, pemirsa sekaligus narasumber dan menjadikan pendengar menjadi pembicara adalah salah satu misi puncak media pewarta warga.

Kelebihan pewarta warga memiliki ikatan yang lebih kuat dengan lokasi peliputannya, sumber-sumber beritanya siapa saja. Kecepatan berita dan kedekatan emosional dari penulis berita yang berstatus pewarta warga tersebut dengan jangkauan wilayah liputannya menjadi keunggulan yang tak dimiliki oleh para wartawan profesional.

Suhardiman, mengungkapkan :

... sebelumnya saya juga sering mendengar apa yang dikatakan citizen journalism. Namun setelah saya gabung dengan PPWI, saya baru tahu bahwa PPWI itu wadah citizen journalist. Kemudian saya baru belajar, ternyata dari 9 elemen jurnalisme yang ternyata di tambahkan jadi ada 1, yaitu bahwa warga masyarakat itu juga ikut ...punya kesempatan dan tanggung jawab terhadap berita ... dan di era informasi di mana akses untuk internet semakin mudah, jadi orang-orang buat komunitas pers di luar jurnalistik industri... semacam komunitas, blog

3.3.2. Usia, Tingkat Pendidikan, Profesi Anggota

Tujuan utama pendirian PPWI adalah memprovokasi kepada setiap orang untuk ikut menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah, para pembuat kebijakan

dan mata dunia. Sehingga profesi anggota pewarta warga beragam, dari pelajar/mahasiswa, aparat pemerintah dan penegak hukum, guru/dosen, pedagang, wiraswastawan, polisi, bahkan wartawan profesional dan profesi lainnya.

Tabel 3.5.
Karakteristik Pewarta Warga

No	Karakteristik Pewarta Warga		Prosentase
1	Usia	>13 tahun	5 %
		14-25 tahun	35 %
		26-50 tahun	40 %
		<51 tahun	20 %
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0 %
		Sekolah Dasar	10 %
		SMP	20 %
		SMA	45 %
		Perguruan Tinggi	25%
3	Profesi	Aparat pemerintah dan penegak hukum	10 %
		Guru/Dosen	25 %
		Pelajar/Mahasiswa	20 %
		Wartawan Profesional	10 %
		Wiraswastawan	20 %
		Pekerja Seni	5 %
		Lain-lain	15 %

Anggota PPWI DPD Yogyakarta tidak hanya masyarakat umum, tapi banyak juga dari militer bahkan wartawan profesional. Bambang Nurharyadi juga mengungkapkan hal yang sama, sejumlah anggota berasal dari aparat penegak hukum, militer dan wartawan profesional. Terbukanya peluang keanggotaan menurut Bambang karena :

.....penyampiannya sebetulnya PPWI bergerak di bidang apapun di manapun tempatnya bisa menyampaikan, tidak

terpengaruh oleh tingkat pendidikan asalkan dia bisa menyampaikan berita. Dia nggak sekolah misalkan anggota PPWI tak lulus SD tapi dia bisa buat facebook dia menyampaikan unek-unek menyampaikan berita walaupun sedikit, sudah bisa disebut pewarta warga. Undang-undang pemberitaan itu tak hanya dimiliki oleh seorang jurnalis, siapa saja berhak menanyakan dan mempertanyakan kebenaran dan kemudian memberitakannya. Termasuk mereka yang mungkin hanya lulusan sekolah dasar. Meski masalah tulis menulis terkadang orang SD kan kosakatanya kurang atau grammarnya kurang.....

Jumlah anggota PPWI dengan tingkat pendidikan SMA terbanyak yaitu 45 % karena masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA merasa pas sebagai anggota pewarta warga. Menurut Wilson :

.....kalau yang pendidikan tinggi tentu mereka lihat keuntungannya apa dengan menjadi anggota. Yang kedua, mereka pada tataran elite mereka berpikir bahwa citizen jurnalis itu kan restruk jadi sehingga kalau melibatkan dari situ seakan-akan menurunkan derajat padahal itu kan cuma paradigm saja. Anggapan-anggapan seperti itu, untuk ke depan, akan saya katakana, soal pendidikan karena begini ketika mendorong masyarakat untuk melibatkan diri dalam dunia publikasi alasan pertama adalah tidak bisa menulis atau tidak mampu mengkonstruksi sebuah ide...

Perihal ada anggota PPWI yang notabene adalah jurnalis profesional, Wilson Lalengke menyebutkan dari pihaknya PPWI tak ada masalah dan mau menerima para wartawan profesional. *“Justru menurut saya yang mempermasalahkan di pihak organisasi mereka karena mereka punya semacam aturan-aturan internal yang ini tidak boleh menjadi anggota organisasi yang lain. Tapi tidak semuanya dilarang, bahkan di beberapa PPWI daerah, pengurus pengurusnya justru wartawan, sebagai contoh di Padang Panjang, dia pimpinan redaksi media mainstream”*.

Suhardiman selain berstatus sebagai anggota PPWI, saat ini juga tengah menjadi wartawan magang di *Jawa Pos*. Ia berpendapat yang namanya pewarta warga tanpa organisasi memiliki independensi personal.

*....saya kira semua orang bisa leluasa menuangkan tulisannya .
Cuma karena ini diwadahi saya kira ada semacam soliditas
kemudian rasa kebersamaan kemudian kesadaran internal
maupun eksternal itu lebih terakomodir, Maksudnya beda
dengan ketika saya berjalan sendiri, maka ilmu itu saya miliki
sendiri tapi ketika ada wadah ini maka kita juga menyadari
kalau orang lain di dalam organisasi kita bahwa kita juga
punya hak untuk memberi informasi kepada orang lain ...*

Cukup variatifnya latar belakang profesi para pewarta warga, menurut Wilson Lalengke, di satu sisi menjadi keunggulan mereka dalam berbagai persoalan dan pemberitaan dari beragam sudut pandang. Di samping itu, komunikasi yang terjalin antara sesama pewarta warga akan menciptakan kohesivitas sosial dalam membawa pencerahan masa depan bangsa. Namun pada sisi lain, beragam latar belakang profesi pewarta warga ini juga berekses kuat pada kemauan dan usaha keras dari pihak manajemen redaksi pewarta warga dan juga lembaga induk yang menaungi.

3.3.3. Hak dan Kewajiban Pewarta Warga

Kewajiban dari pewarta warga adalah memberitakan segala sesuatu secara objektif artinya melakukan proses peliputan dengan berimbang (*cover both side*), selalu *check and cross check*, selalu menampilkan nama terang untuk segala jenis penulisan pewarta warga berkewajiban menjunjung teguh komitmen setia untuk selalu jujur dan terbuka, pewarta warga juga berkewajiban meralat segala pemberitaan yang salah ataupun keliru yang merugikan banyak orang dengan sesegera mungkin. Setiap pewarta warga berkewajiban melaporkan apa adanya setiap kejadian dan peristiwa yang mereka saksikan sehingga setiap pewarta warga memiliki otoritas penuh dan tanggungjawab penuh terhadap segala efek buruk yang ditimbulkan akibat penyebaran informasi bohong dan rekayasa.

Setiap pewarta warga berhak memperoleh segenap informasi dari siapapun sumber berita tanpa ada kecuali dengan tetap memperhatikan etika dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat Setiap pewarta warga memperoleh perlindungan hukum, advokasi dari organisasi induk para pewarta warga itu

bergabung. Pewarta warga berhak mendapatkan kartu tanda pengenal (jika memang itu diperlukan) sebagai kartu identitas agar tak terjadi miskomunikasi antar pewarta warga dan keperluan lain dalam peliputan.

Pewartawarga berkewajiban menghormati setiap orang sesuai profesi orang lain baik berbeda agama, suku, ras. Pewarta warga berkewajiban membina hubungan baik dengan setiap lembaga baik swasta maupun pemerintahan serta berhak menjalin mitra baik dengan jurnalis media cetak dan elektronik lainnya, lakukan pemerasaan, pencemaran nama baik orang lain maupun lembaga dan diharamkan menerima sogokan berupa uang ataupun barang yang mempengaruhi keobjektifan karya tulis. Secara prinsipil, hak dan kewajiban pewarta warga sudah terakomodir dalam kode etik pewarta warga yang berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, seperti yang sudah dibahas di atas.

3.3.4. Syarat Keanggotaan

Tak sulit bagi setiap orang untuk bergabung menjadi anggota PPWI memang tak mensyaratkan kriteria khusus. Bambang Nurhayadi mengungkapkan, yang penting memiliki jiwa kesukarelaan dan keikhlasan berbagi informasi dengan semua orang. Meski demikian untuk memudahkan administrasi, pihak PPWI merekomendasikan kepada setiap orang yang berniat bergabung menjadi pewarta warga untuk melakukan registrasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data induk terkait identitas dan keberadaan sang pewarta warga bersangkutan.

Tak ada larangan dan tak ada pula perintah kepada pewarta warga untuk sekaligus menjadi penulis (kontributor) pada media massa cetak. Pun sekalipun ada banyak pewarta warga yang juga rajin menyumbangkan karya-karya mereka kepada media-media konvensional (koran, majalah, tabloid).

Walaupun tidak ketat, setiap tulisan yang masuk tetap saja melalui seleksi dan koreksi. Pada tahap seleksi dan koreksi inilah tulisan-tulisan terlarang, misalnya SARA atau mendiskreditkan seseorang, disaring. Bagi pembaca yang ingin bergabung ke media-media tersebut, tinggal mengunjungi situsnya dan mendaftar.

Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi anggota pewarta warga, yaitu : (1) Registrasi data penulis; (2) tulisan yang dikirim bukan karya plagiarisme dan juga tidak melanggar undang-undang; (3) mematuhi hak cipta yang berlaku di Indonesia maupun internasional; (4) tidak menulis hal yang berbau pornografi maupun hal-hal yang melanggar etik; (5) tulisan bukan berupa iklan atau berita yang bersifat komersil; (6) tulisan merupakan sumbangan sukarela tanpa honor; (7) penulis bertanggungjawab penuh atas berita yang ditayangkan; (8) tulisan tidak bersifat provokatif maupun hasutan; (9) kebenaran isi berita bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan; (10). tulisan tidak boleh menyinggung menyudutkan maupun melecehkan pribadi atau organisasi tertentu, agama, kepercayaan suku dan etnis.

Setelah itu, bisa langsung memosting (mengirim) tulisan. Dengan tanpa seleksi yang ketat, tulisan kemungkinan besar bisa dimuat. Atau, bagi yang menginginkan kebebasan penuh adalah dengan membuat *blog* dengan mendaftar ke wordpress.com, blogspot.com, atau server-server gratis lainnya. Persyaratannya tidak banyak kecuali sedikit informasi pribadi beserta alamat *e-mail*. Setelah itu, pewarta warga dapat langsung menulis atau meng-*upload* tulisan atau data secara bebas. Karena bebas, tentu saja semua risiko atas ketidakakuratan data sampai pelanggaran hak cipta (misalnya menjiplak tulisan orang lain tanpa izin dan tanpa etika) menjadi tanggung jawab kita sendiri.

3.3.5. Peran dan Fungsi Anggota

Keunggulan pewarta warga justru terletak pada kedekatannya dengan wilayah atau objek bidik yang dijadikan bahan berita karena pewarta warga idealnya hanya “diperkenankan” meliput kawasan seputar tempat tinggalnya saja. Jangkauannya tak seperti liputan wilayah liputan wartawan profesional meski tak diharamkan bagi para pewarta warga untuk meliput di berbagai daerah, lintas kabupaten, provinsi bahkan negara. Karena peran dan fungsi inilah maka para pewarta warga dibekali “kartu pers” untuk keperluan kerjanya.

Supadiyanto menegaskan,

.....Kalaupun ada penyalahgunaan kartu pengenal tersebut untuk kepentingan pribadi, media pewarta warga dan organisasi induk pewarta warga akan melakukan langkah tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.....

Peran lain dari pewarta warga adalah dapat memberitakan informasi yang penting bagi pengguna itu sendiri dan komunitasnya. Walaupun terkadang sesuatu yang penting menurut seseorang akan sangat berbeda dengan apa yang penting menurut mainstream media.

...Mau jelek mau bagus. Asal ditulis berdasarkan fakta, tulisan sejelek apapun akan tetap dimuat. Lagian jelek bagus kan relatif. Jadi ya tergantung pembaca juga, bukan hanya tergantung penulis untuk menilainya.....

Jurnalisme warga justru untuk memberi tempat untuk masalah-masalah sepele yang tidak mungkin diliput apalagi ditulis media umum seperti koran, TV, radio, dan seterusnya. Selain itu pewarta warga, bukan penulis profesional. Di zaman yang makin tidak jelas batasnya ini, menulis bukan lagi monopoli wartawan dan penulis. Siapa pun yang berminat bisa menulis dan mempublikasikannya untuk banyak orang. Teknologi sudah memberi tempat untuk itu semua.

Supadiyanto mengatakan bahwa pewarta warga merupakan pelengkap karena jika di hitung jumlah wartawan profesional di Indonesia tidak cukup untuk mengcover seluruh Indonesia sehingga perlu penciptaan semua orang bisa menjadi seorang wartawan.

Suhardiman, anggota pewarta warga mengungkapkan ketidakadilan, emosi, ketertekanan hidup dan hal lain yang perlu diungkapkan. Hasilnya, bisa berdampak luas bagi masyarakat. Lihat saja kasus korupsi. Ia tidak akan berdampak luas manakala tidak disebarkan lewat media, salah satunya blog.

Para pewarta warga pun dapat membuat gerakan besar di bidang transparansi, anti korupsi dan reformasi birokrasi. Setiap pewarta warga

menuliskan pengalaman mereka saat mengalami pungli, penyalahgunaan jabatan, arogansi aparat dan keruwetan birokrasi. Dengan menuliskan hal tersebut di surat kabar, langkah kecil kita amat berarti. Dan di media CJ, para pewarta warga kembali menuliskan hal tersebut dengan rinci. Sinergisitas atau penungggangan inilah yang diharapkan mampu mendorong pencerdasan pada masyarakat dan pembersihan birokrasi. CJ pasti akan mampu meraih kepercayaan dari masyarakat, bila respon positif dan stigma pendobrak kebobrokan dapat diraih. Karena independensi adalah kata yang paling ditakuti oleh para pemodal berwatak jahat dan juga mereka yang berkepentingan menelantarkan masyarakatnya.

3.3.6. Motif

Motivasi menjadi pewarta warga dan bergabung dengan Persatuan Pewarta Warga adalah pertama, karena ada rasa memiliki. Kesadaran sosial ini merupakan motivator terbesar. Kedua, untuk meraih kepuasan diri karena memberikan kontribusi. Ketiga, untuk mengembangkan kemampuan dan kesempatan untuk pembentukan ego. Keempat, untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki otoritas atas subyek tersebut. Kelima, untuk menciptakan hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat sejenis. Keenam, kepedulian dan pemahaman. Kadang jurnalis *mainstream* mewawancarai para tokoh yang sebenarnya tidak terlibat langsung dengan peristiwa yang menjadi persoalan. Maka mereka yang terlibat langsung ingin mengatakan kebenaran menurut versi mereka sebagai saksi mata atau pelaku. Ketujuh, untuk saling menginformasikan. Kedelapan, untuk saling menghibur. Kesembilan, untuk mendapatkan kesenangan. Kesepuluh, untuk mengaktualisasikan diri. Sebelumnya proporsi antara pencipta dan konsumen adalah 5% banding 95%. CJ membantu mereka yang menjadi konsumen untuk menciptakan sesuatu.

Motif pewarta warga adalah panggilan jiwa untuk membagikan pengalaman, informasi kepada sebanyak mungkin orang tanpa mengharapkan imbalan, honor uang dan bentuk apresiasi sosial apapun

Para pewarta warga bekerja atas kemauan diri mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan atau rayuan pihak lain. Pewarta warga bekerja demi lahirnya

masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, tak terpasung oleh minimnya informasi yang terpaksa mereka terima karena kondisi kemiskinan, penjajahan dalam arti yang seluas-luasnya dan kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat.

Motivasi Supadiyanto menjadi anggota PPWI fokusnya hanya menulis, terutama menulis hal-hal yang tidak diberitakan media mainstream.

...sementara anggota pewarta warga sendiri tekniknya ada dua modus, yaitu bagaimana kita juga bisa punya penghasilan, kita jadi profesional kita juga bisa jadi pewarta, kita juga bisa menulis di media konvensional di koran koran ya ... kita mengajarkan itu semuanya jadi kita menjadi kolom kan kita menulis banyak rubric di media mainstream....

Suhardiman menjadi anggota pewarta warga karena merasa kewajibannya sebagai warga untuk menginformasi kebenaran meskipun sebelumnya dia magang di Jawa Pos dan menjadi pemimpin redaksi koran kampus.

...Sebenarnya kalau untuk peluang menulis, media mainstream juga punya kolom khusus yang mengakomodasi tulisan-tulisan masyarakat umum, seperti Jawa Pos, Kompas, Suara Merdeka....

3.3.7. Media Dan Teknologi Yang digunakan

Kehadiran jurnalisme *online*, tidak terlepas dari fungsi dan peran internet dalam penyebaran informasi kepada khalayak, jurnalisme sendiri berarti aktivitas mencari, meliput, menulis, mengedit dan menyajikan informasi kepada khalayak. Sementara jurnalisme online berarti perkawinan antara jurnalisme konvensional dan teknologi komunikasi dalam hal ini internet, yang ditetapkan oleh standar *world wide web* (wwb). Secara sederhana jurnalisme online diartikan sebagai proses pelaporan dan penyampaian informasi atau fakta yang didistribusikan melalui internet.

Leslie David Simon menyatakan bahwa internet dapat membuat setiap orang menjadi penerbit dengan pembaca yang luas. Internet dapat memberdayakan warga dan konsumen dengan menyediakan pengetahuan.

Pernyataan ini relevan jika melihat fenomena citizen journalism yang di tawarkan media online, dan menjadi salah satu keunggulan dibandingkan media konvensional seperti media cetak. CJ atau dalam pengertian bahasa Indonesia disebut dengan jurnalisme warga mulai berkembang di Indonesia bersamaan dengan berkembangnya media *online* termasuk blog. Perkembangan di Asia sendiri di mulai pada tahun 2004.

Seiring dengan perkembangan zaman, jurnalisme warga juga semakin berkembang. Internet merupakan salah satu 'fasilitas' dalam melaksanakan *CJ* ini. Tidak hanya itu, internet yang sebelumnya hanya dapat dioperasikan melalui komputer, sekarang dapat dioperasikan melalui telepon genggam atau biasa kita kenal dengan *hand phone*. Melalui koneksi internet di *hand phone*, seseorang dapat mengabarkan berita yang disaksikan bahkan dialaminya kepada banyak orang hanya dalam hitungan detik.

Kehadiran media baru (*new media*) ini telah membawa pengaruh besar pada media massa yang sudah ada sebelumnya. Pengaruh itu tampak ketika masyarakat tidak hanya bergantung pada media massa (merujuk pada media cetak dan elektronik berupa televisi dan radio) yang dihasilkan pers. Media massa yang tidak mau kehilangan pembaca ataupun pemirsa pada akhirnya menerapkan *CJ*. .

Media baru merujuk pada keberadaan internet. Dengan dunia maya tersebut, masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan informasi secara global. Masyarakat pun ternyata tidak hanya bisa bertindak pasif. Melalui internet, masyarakat juga bisa menyampaikan informasi yang mereka ketahui kepada khalayak. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, atau melalui situs pribadi maupun blog yang pembuatannya sudah sangat mudah saat ini.

Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi ternyata membawa dampak percepatan dalam komunikasi. Hal itu terjadi khususnya pada jangkauan informasi yang diberikan semakin luas. Informasi yang sebelumnya tidak ditemukan dalam media massa, masyarakat bisa mendapatkannya sekarang melalui internet.

Meskipun demikian, dalam media baru yang mengandalkan internet, penyaringan informasi masih menjadi kendala. Internet hanya menyediakan informasi secara global. Sementara itu, pembaca tidak serta merta mengetahui keakuratan maupun kebenaran atas informasi yang tersedia. Masyarakat pun diharuskan menyaring sendiri informasi yang hendak mereka lihat.

Dan ide di belakang CJ adalah orang-orang tanpa kemampuan profesional dilatih untuk dapat menggunakan perangkat teknologi modern serta internet untuk membuat, mengembangkan atau melakukan *cross-check* segala media yang mereka miliki atau bekerjasama dengan orang-orang lainnya dalam menyusun. Para anggota pewarta warga bisa melakukan *fact-check* pada sebuah sumber berita seperti koran, televisi, radio, internet dan media lainnya. Media yang selama ini bisa digunakan secara optimal hanyalah yang melalui internet. Minimal ada 3 jenis, blog pribadi, media citizen journalism yang ditumpangkan pada mass media seperti kompasiana pada <http://kompas.com>, dan pada situs yang murni mengandalkan CJ seperti pada <http://kabarindonesia.com> (HOKI), <http://swaberita.com>, <http://thirdreport.com> atau <http://wikipedia.org>, atau pun www.pewarta-indonesia.com. Dan sekarang ini bertambah satu lagi, yaitu situs jejaring social seperti *Facebook, Friendster, Flickr, YouTube*.

Menurut Wilson Lalengke, CJ lahir dari peradaban dan perkembangan teknologi. Sekarang, berita-berita *hardcopy* sudah mulai didampingi internet, bahkan siapa saja bisa menjadi penulis. Hal ini bukan merupakan bentuk persaingan media, tapi justru merupakan perluasan media,

3.3.8. Teknik Kerja dan Pengembangan Diri

Media informasi konvensional seperti koran, majalah, televisi, dan radio membutuhkan biaya yang tinggi dalam penggunaannya. Belum lagi dibutuhkan keahlian khusus yang tidak dapat dikuasai dalam waktu singkat seperti penggunaan kamera atau peralatan siaran. Maka dari itu tidak semua orang dapat memilikinya atau dapat menggunakannya.

Sebaliknya, penggunaan kamera digital, kamera handphone, netbook, sangat mudah dan murah. Para pewarta warga dapat menggunakan komputer atau

laptop dan dapat mengaksesnya di mana pun berada. Apalagi, sekarang dengan perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, mengupload berita bisa dilakukan melalui telepon genggam.

Para pewarta warga punya kendali penuh atas alur informasi yang dia terima maupun yang dia berikan. Perbedaannya adalah kita tidak akan terjebak pada konten informasi yang sama seperti ketika kita selalu menemukan sinetron pada beberapa stasiun TV. Variasi jenis informasi sangatlah beragam. Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita.

3.4. Etika CJ dan Nilai Berita Pewarta Warga

3.4.1. Etika Citizen Journalism

Peranan CJ amat vital dalam konvergensi media. Karena CJ kini yang dapat menjadi alternatif dan penyeimbang dunia industri media yang rentan dengan kepentingan pemodal. Ada pertanyaan yang menggelitik. Yakni, sejauh mana mekanisme pertanggungjawaban berita yang disampaikan oleh para pewarta warga? Ini masih belum jelas. Apakah pihak redaksi ataukah pewarta sendiri yang bertanggung jawab penuh. Kesahihan suatu informasi diserahkan pada redaksi atau pembaca? Bilamana terjadi kerugian akibat pemberitaan atau tuntutan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab, karena UU Pers sendiri kini belum mengatur hal tersebut bagi CJ

Pertanyaan itu pasti akan terlontar secara eksplisit maupun implisit dalam setiap rapat redaksi media profesional. Pola pemberitaan *hard news*, *straight news*, *running news*, *analisa* dan *opini* adalah makanan sehari-hari industri media sedari jabang bayi. Bergantung pada pola di atas, jelas sulit bagi CJ untuk menjadi alternatif dan penyeimbang. Walau harus diakui, hal tersebut (*hard news*, *straight news*, *running news*, *analisa* dan *opini*) sulit dikesampingkan bila kita menggunakan emblem jurnalistik.

CJ atau jurnalisme warga merupakan kegiatan di mana peran wartawan atau kegiatan jurnalistik bisa dilakukan oleh masyarakat yang secara formal bukan wartawan. Kegiatan yang dilakukannya sama dengan wartawan pada umumnya,

yakni mengumpulkan informasi, menulis berita, mengedit dan menyiarkannya. Keterbukaan dalam hal pengaksesan ataupun penyampaian informasi yang dimiliki oleh CJ yang seiring dengan perkembangan jurnalisme online yang terus meningkat, menyebabkan keberadaan CJ akan terus eksis. Selain kekuatan yang dimiliki CJ, di mana CJ memungkinkan masyarakat dapat bertukar informasi mengenai suatu hal yang dapat membuat masyarakat semakin terbuka wawasannya, CJ juga memiliki kendala yang sulit dihindari yang otomatis dapat menjadi tantangan bagi keberadaan CJ ke depan.

Selain tidak adanya batas yang jelas, hal lain yang dapat menjadi tantangan dalam CJ adalah masyarakat atau orang-orang yang memasukkan informasi melalui internet tidak harus melalui pendidikan jurnalisme terlebih dahulu. Dalam CJ, semua orang dapat menjadi wartawan. Oleh sebab itu, terkadang berita yang dimuat terkadang tidak sesuai dengan aturan penulisan berita atau etika jurnalisme yang ada. Karena itu, menjadi *citizen journalist* juga ada etikanya.

Kekhawatiran dari mainstream media di Indonesia tentang jurnalisme warga adalah kurang dipahaminya kode etik jurnalistik oleh reporter warga seperti objektivitas, adil dan seimbang, menjunjung tinggi kebenaran, cek dan ricek dan tidak meniru. Aulia mengkhawatirkan kredibilitas dari berita yang ditulis dari reporter warga. Untuk stasiun televisi, cukup mudah untuk memverifikasi video amatir, namun untuk stasiun radio, media cetak dan situs online cukup sulit untuk mengecek berita dari warga.

.....Kami membangun reputasi koran kami dengan berita yang akurat dari wartawan profesional yang tahu tentang kode etik dan potensi tuntutan hukum dalam pekerjaannya. Berita dari warga, karena mereka bukan profesional, sangat rawan terhadap informasi yang salah, dan kalau itu terjadi, reputasi media dalam bahaya....

Meski demikian, media *mainstream* tetap dituntut untuk memperhatikan jurnalisme warga dan mengadopsi jurnalisme warga sampai tingkatan tertentu.

Karena tidak bisa dipungkiri reporter warga terlihat semakin sering melaporkan berita dari sumber yang sebelumnya tidak terjangkau oleh wartawan profesional. Semakin media mengakomodasi publik tentunya semakin termotivasi publik untuk menyisihkan waktu untuk mengirimkan berita. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat yang memiliki keahlian tertentu akan mempertahankan reputasinya dengan mengecek dan memverifikasi berita yang mereka buat seperti yang dilakukan wartawan profesional.

Dalam situasi demikian, media tidak akan kehilangan kredibilitas malahan menaikkan citranya sebagai media publik. Kuncinya adalah menemukan warga yang memiliki keahlian tertentu untuk menjadi reporter warga bagi media.

Mekanisme untuk mencegah berita bohong dapat dilakukan dengan menerapkan kode etis/praktik reporter warga. Laporan masyarakat mesti datang dari sebuah peristiwa, bukan pernyataan pers atau investigasi. Sehingga perlu dicek kebenarannya sebelum dipublikasikan. Selain itu identitas pewarta warga juga harus jelas dan dapat dihubungi ketika ada pertanyaan yang mesti disampaikan. Kredibilitas media tidak dibangun semata-mata karena menjadi pertama dalam menyampaikan berita, tapi juga karena proses pembuatannya yang transparan. Kredibilitas mesti diberi definisi baru karena ia akan tumbuh melalui transparansi sumber dan berita seperti yang ditekankan..

Persoalan etika jurnalistik dalam jurnalisme warga ini memang menarik. Tidak semua nilai-nilai dalam kode etik jurnalistik untuk reporter profesional dipunyai oleh reporter warga. Tidak menyebarkan informasi yang keliru, menyebutkan identitas diri ke sumber berita, meminta maaf seperlunya jika ada kesalahan.

Wilson Lalengke menyatakan bahwa reporter warga mesti bekerja dengan semangat bahwa semua warga adalah reporter dan menjelaskan kedudukannya jika sedang meliput berita. Syarat lainnya termasuk: reporter warga tidak menyebarkan berita palsu, tidak menggunakan bahasa yang vulgar dan menyerang secara pribadi. Reporter warga juga tidak boleh menghancurkan reputasi orang dengan melanggar privasi. Reporter warga mesti menggunakan metode yang sah dalam meliput

Mengenai implikasi hukum, Undang-Undang Pers No.40/1999 menjamin kebebasan pers di Indonesia. Ketetapan UU ini dimaksudkan untuk reporter profesional. Contohnya Pasal 7, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Sejauh ini reporter warga di Indonesia tidak mempunyai kode etik karena jurnalisisme bukan aktivitas utama mereka, sehingga ada kelemahan dari sisi hukum. Oleh sebab itu, jika satu *mainstream* media menerapkan jurnalisisme warga, diperlukan perlindungan hukum terhadap reporter warganya supaya tidak terjadi kebingungan siapa yang bertanggung jawab atas masalah hukum yang muncul dari suatu berita reporter warga.

PPWI mengantisipasi hal tersebut dengan elegan dengan membuat perjanjian antara organisasi, dan reporter warganya tentang hak dan kewajiban reporter warga tentang tuntutan terhadap berita reporter warga. Wilson meyakini bahwa masalah hukum adalah hal yang normal dalam jurnalisisme.

...kita mesti siap berhadapan dengan tuntutan hukum, karena bagaimanapun hal itu akan datang sewaktu-waktu....

Aulia A Muhammad, mantan pemimpin redaksi *Cybernews Suara Merdeka* dan Redaktur Senior *Tabloid Cempaka* menyatakan warga bukan wartawan, jadi tidak kena kode etik jurnalistik. Pada hakikatnya warta warga berbeda dengan jurnalistik. Dalam ranah profesional, warta warga memiliki ciri khas sendiri karena tidak terikat dalam hukum-hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Selanjutnya, pewarta warga dalam memberikan laporan kejadian (reportase) tidaklah harus sesuai dengan kode-kode yang diatur oleh PWI dalam masalah etika. Pewarta warga melaporkan hal-hal menarik dalam sebuah berita kejadian. Hal itulah yang membedakannya dengan wartawan yang mengutamakan ketepatan dan aktualitas berita .

....memang dalam penyajian berita seorang CJ tetap harus mengikuti kaidah pelaporan kejadian yang mudah dimengerti, semisal setidaknya memenuhi unsur 5W + 1H. Akan tetapi, sifat pemberitaan warga yang lebih fleksibel dan bersifat insidental, maka yang terpenting adalah menyampaikan kejadian kepada publik secepatnya, berdasarkan fakta-fakta atau keterangan yang ada saat itu.....

Untuk menjaga validitas berita hasil warta warga yang kemudian ditampilkan dalam media arus utama, biasanya pihak editor media *mainstream* akan langsung mengonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada si pewarta warga. Hal ini juga dimaksudkan agar kebenaran informasi berdasarkan data-data pewarta warga (semisal dalam bentuk foto waktu kejadian) bisa diteruskan menjadi berita di media-media arus utama, lengkap dengan validitas kejadian yang sebenarnya di lapangan.

Perihal kartu identitas yang diberikan kepada pewarta warga, Aulia berpendapat bahwa seorang pewarta warga tidaklah perlu mendapat identitas khusus sebagai pewarta, seperti kartu pers. Ada, setidaknya, dua alasan. Pertama, pewarta warga tetaplah warga “biasa”. Pewarta bukankah wartawan profesional yang memang bekerja untuk membuat berita. Pewarta warga biasanya bekerja di bidang lain, bisa pemandu wisata, dokter, pegawai negeri, atau jurnalis profesional itu sendiri. Tapi, ada perbedaan motivasi dalam menyampaikan berita, baik gambar ataupun teks, melalui media jurnalisme warga. Dengan begitu mereka akan membawa warna berbeda di antara homogennya media-media arus utama.

Pewartawarga warga membagi informasi lebih karena hobi, bukan karena ingin dibayar oleh media. Ini memang bisa diperdebatkan karena sejumlah media jurnalisme warga juga mulai memberikan intensif pada kontributornya. Tapi, hingga saat ini, sebagian besar media jurnalisme warga tetap mengundang warga untuk menulis bukan karena motivasi honor tersebut.

Karena pewarta warga adalah warga biasa, maka dia tak perlu identitas khusus ketika meliput berita. Dengan menggunakan “kartu pers”, maka pewarta warga tidak lagi warga “biasa”. Keunikan warga ketika menyampaikan berita melalui media jurnalisme warga adalah karena dia (diharapkan) bisa mewakili sudut pandang warga. Sudut pandang ini akan melengkapi sudut pandang wartawan yang sudah terlalu sering ada di media *mainstream*. Ketika pewarta warga sudah bekerja dengan tata cara ala jurnalis profesional, maka dia tak lagi menjadi alternatif. Dia sama dengan wartawan pada umumnya.

Kedua, penggunaan kartu pers tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ketika membawa kartu pers, maka si pembawa kartu “resmi” menjadi jurnalis profesional yang terikat oleh etika. Tapi, dari mana kita tahu bahwa si pembawa kartu itu layak mendapatkan predikat sebagai jurnalis resmi. Secara sederhana, wartawan profesional itu terikat pada dua lembaga, media tempat dia bekerja atau organisasi profesi tempat dia bernaung. Untuk masuk ke perusahaan media, prosesnya tak mudah. Ada banyak tahapan seleksi.

...Begitu juga ketika jurnalis profesional bergabung dengan sebuah organisasi profesi. Di Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di mana saya bergabung, calon anggota harus menunjukkan contoh karya, tiga rekomendasi anggota lama, serta sudah diperiksa ulang (verifikasi) latar belakangnya. Meski karyanya bagus tapi kalau suka minta amplop saat liputan, dijamin dia tak akan diterima sebagai anggota. Tapi, itu tidak terjadi di jurnalisisme warga. Tiap kontributor di jurnalisisme warga tidak terikat secara hukum dengan media tempat dia mengirim berita. Sebab, media jurnalisisme warga tidak punya hirarki seperti, atau setidaknya tidak seketat, media mainstream. Kontributor jurnalisisme warga bisa menjadi editornya sendiri.....

Suhardiman menambahkan, persoalannya bukan pada perlu memiliki kartu anggota atau tidak. Menjadi pewarta warga itu pada mulanya harus dilandasi itikad baik, yaitu mendapatkan informasi, melaporkan peristiwa, serta membagikan temuannya secara jujur, akurat, dan berimbang. Pewarta warga juga harus memegang teguh etika dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal.

...seorang pewarta warga tak harus bekerja sebagaimana halnya jurnalis profesional, yang bekerja nyaris 24 jam, membongkar korupsi, memburu berita-berita kriminal dengan bertaruh nyawa, atau meliput seminar di luar negeri. Biarkanlah urusan seperti ini dikerjakan oleh jurnalis profesional. Pewarta warga sebetulnya justru lebih baik menggarap wilayah liputan yang luput dari radar jurnalis profesional....

3.4.2. Nilai Berita

Perkembangan *citizen journalism* (jurnalisme warga) melalui beragam media seperti blog dan jejaring sosial (*social networking*), dan situs sempat dikhawatirkan akan ‘mengancam’ keberadaan media baik cetak maupun elektronik. Namun kekhawatiran ini dibantah oleh Aulia A Muhammad, mantan pemimpin redaksi *Cybernews Suara Merdeka* : *citizen journalism* bukan merupakan ancaman bagi media, karena jurnalisme warga kebanyakan opini.

Jurnalisme warga, bisa siapa saja dan bebas berekspresi melalui tulisannya. Padahal, seorang jurnalis harus mengedepankan fakta dalam pemberitaannya dan menghilangkan opini sehingga karya jurnalistik tersebut dapat dipercaya. Karya jurnalistik itu berbeda dengan karya jurnalisme warga, selain terdapat nilai-nilai berita, karya jurnalistik memberikan informasi sesuai fakta dan kebenaran yang ada.

Aulia menuturkan *citizen journalism* kebanyakan berupa kritikan yang menghakimi para politisi atau penguasa terkait isu yang sedang terjadi. Sedangkan seorang jurnalis menyampaikan apa yang sedang dan sudah terjadi kepada khalayak. Jurnalis saat ini merupakan profesi yang mengedepankan idealisme dan loyalitas dalam menyampaikan informasi kepada rakyat. Berbeda dengan *citizen journalism* yang kebanyakan belum mengenal betul kode etik jurnalistik.

.....Hal ini kembali kita pulangkan kepada masyarakat, apakah lebih percaya terhadap citizen journalism atau informasi yang ditayangkan atau dimuat media resmi, namun saya pikir masyarakat sekarang cukup bijak dalam memilih....

Jurnalis profesional, jelas Aulia bekerja berdasarkan standar prosedur, undang-undang, prinsip, dan kode etik jurnalistik. Dalam bekerja, mereka selalu menjadikan semua pegangan itu sebagai acuan untuk mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan pembaca. Kejujuran, sekali lancung ke ujian, selamanya tidak akan dipercaya lagi oleh pembaca. Kabar bohong, menyesatkan, manipulatif, dan melanggar etika mungkin akan membuat wartawan cepat populer. Tapi kelak akan

menuai hasilnya, kehilangan kepercayaan dan kredibilitas. Kebanyakan berita “panas” pun baru keluar setelah seorang jurnalis menghabiskan berbulan-bulan atau bertahun-tahun melakukan verifikasi, check and recheck, serta menguji ulang sumber-sumbernya.

Akurasi adalah mahkota sebuah laporan. Wartawan harus yakin bahwa semua bahan yang ditulis itu akurat. Wartawan tak boleh salah menyebut nama dan umur sumber, tanggal, lokasi kejadian, dan sebagainya. Presisi, ketepatan penulisan adalah kunci, baik dalam menuliskan kata maupun kalimat. Ia membantu kita memperoleh respek dan legitimasi. Konsistensi, agar jurnalis menulis secara konsisten. Sesuatu yang konsisten membuat pembaca tak bingung.

Baca ulang. Para jurnalis terbiasa membaca kembali dan menyunting ulang laporan mereka. Langkah ini ditempuh guna memastikan apakah sebuah berita telah ditulis dengan akurat, presisi, dan tak mengandung kesalahan tulis atau ejaan. Pastikan apakah kalimat mengalir lancar. Periksa juga apakah setiap fakta, misalnya nama sumber, sudah ditulis dengan benar. Lihat apakah tata bahasa dan ejaannya sesuai dengan kaidah, tak ada kesalahan ketik, dan sebagainya.

Untuk itulah Aulia memberikan saran, pewarta warga yang baik harus realistis dalam membuat berita. Jika ingin membuat laporan jurnalisme warga, pastikan memiliki data-data yang nyata. Pewarta warga yang baik menceritakan kisah yang ada di sekitar hidupnya. Di sekitar kita ada banyak hal yang bisa di tulis. Tergantung cara mengemasnya. Pewarta warga yang baik menulis berdasar sudut pandang dirinya. Tulislah kisah menurut sudut pandang pewarta warga sendiri. Pewarta warga yang baik berbagi dengan orang lain.

...pewartawarga yang baik memegang teguh kebenaran. Kebenaran merupakan kunci kesuksesan dan kepercayaan. Karena itu jangan gunakan imajinasi. Pewarta warga yang baik menulis peristiwa sehari-hari..